



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020  
BALAI PENGELOLA TRASPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2020

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Dani M Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	6/1/2021	
2	Dikonsep	Zeynabila K.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	6/1/2021	
3	Diperiksa	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	6/1/2021	
4	Disetujui	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	6/1/2021	
5	Disetujui	Djoko Srijanto, ATD., M.Si.	Kepala Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis	6/1/2021	
6	Disetujui	Tofan Muis, A.Md., LLAJ., S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	6/1/2021	
7	Disetujui	Rudu Sutrisno, ATD.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan	6/1/2021	
8	Disetujui	Denny Michels Adlan, S.T., M.M.	Kepala BPTD Wil. IX Jabar	6/1/2021	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WIL IX PROVINSI JAWA BARAT



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPTD WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020



Bandung, Januari 2021

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Perhubungan tentunya termasuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan amanat yang tertera dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang serta telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan dari peraturan-peraturan tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disajikan gambaran secara transparan mengenai pencapaian kinerja dibandingkan dengan target ditetapkan di awal tahun, dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategisnya yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, masih dijumpai banyak kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan

bagi para pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan apresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Bandung, Januari 2021

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**



**DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM**

Penata Tk.I (III/d)  
NIP.19790205 200604 1 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang... ..	5
1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja... ..	6
1.2.1 Tugas dan Fungsi.....	6
1.2.2 Struktur Organisasi... ..	8
1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja.....	10
1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....	10
1.4.1 Potensi... ..	10
1.4.2 Isu Strategis.....	11
1.4.3 Permasalahan .....	13
1.5 Sistematika Pelaporan .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>24</b>
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	24
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	24
3.3 Analisis Efisiensi.....	26
3.4 Realisasi Anggaran .....	28
3.4.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2020 .....	28
3.4.2 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja ..	29
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran Tindak Lanjut.....	65
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I. Cascading Map	
Lampiran II. Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan TA 2020	
Lampiran III. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	
Lampiran IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran V. Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2020	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. LKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan LKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 (satu) tahun anggaran.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun LKIP sebagai acuan dan tolok ukur pengukuran kinerja setiap tahunnya. Penyusunan LKIP oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang dihasilkan akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan ke depan, baik yang bersifat masih belum tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan maupun yang telah tercapai atau bahkan sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Evaluasi baik untuk perbaikan peningkatan kinerja maupun mencoba untuk tetap dapat mempertahankan terhadap capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target yang ditetapkan. Penyusunan LKIP BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat tahun 2020, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama tahun 2019 sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2020.

## **1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

### **1.2.1 Tugas dan Fungsi**

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang di usahakan secara komersial dan yang belum di usahakan secara komersial.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB),

pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan industri karoseri;

3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## 1.2.2 Struktur Organisasi

Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



Tabel 1.1 Struktur Organisasi BPTD Tipe B

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hokum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan

pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis Komersil

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

e. Satuan Pelayanan

Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang. Alokasi jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk masing-masing satuan pelayanan dan kantor induk sebagai berikut :

No	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI (Orang)		
		PNS	PPNPN	Jumlah
<b>A</b>	<b>Kantor Induk</b>	25	43	68
<b>B</b>	<b>Satpel Terminal</b>			
	1. TTA Harjamukti - Cirebon	22	26	48
	2. TTA Indihiang - Tasikmalaya	30	33	63
	3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi	23	40	63
	4. TTA Ciakar - Sumedang	15	27	42
	5. TTA Guntur Melati - Garut	28	41	69
	6. TTA Banjar	17	36	53
	7. TTA Cikampek	3	17	20
	8. TTA Subang	13	27	40
	9. TTA Kertawangunan - Kuningan	14	27	41
<b>C</b>	<b>Satpel UPPKB</b>			
	1. UPPKB Balonggandu - Karawang	21	22	43
	2. UPPKB Losarang - Indramayu	11	27	38
	3. UPPKB Kemang - Bogor (sosialisasi operasi)	11	12	23
	4. UPPKB Bojong - Cianjur (belum operasi)	1	2	3
	5. UPPKB Cibaragalan - Purwakarta (belum operasi)	1	1	2
	6. UPPKB Tomo - Sumedang (sosialisasi operasi)	14	15	29
	7. UPPKB Gentong - Tasikmalaya (sosialisasi operasi)	18	8	26
	8. UPPKB Sindangrasa - Ciamis (belum operasi)	1	1	2
	<b>TOTAL</b>	272	458	730

### 1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

#### 1.4.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan citra bangsa dalam dunia internasional.

#### **1.4.2 Isu Strategis**

Isu strategis yang berkembang saat ini sesuai dengan pengaruh baik internal maupun eksternal, mengingat BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat merupakan institusi yang relatif masih baru sangat dipengaruhi oleh kedudukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Adapun isu strategi yang mengemuka adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Konektivitas Nasional Untuk Keseimbangan Pembangunan  
Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi perlu diintegrasikan dengan pelayanan

sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia.

Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

b. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

### **1.4.3 Permasalahan**

a. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.

2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
  - a) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
  - b) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
  - c) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
    - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
    - 2) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb.
  - d) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
  - e) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
    - 1) Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
    - 2) Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- 3) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- 4) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

b. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

1. Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
2. Belum tersusun data sarana prasarana transportasi penyeberangan;
3. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
4. Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
5. Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

c. Permasalahan Transportasi Perkotaan

1. Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;

2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
  3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
  4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
  5. Kemacetan lalu lintas;
  6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
  7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.
- d. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
  2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
  3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
  4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

## 1.5 Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika penyusunan LKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. **BAB I PENDAHULUAN**, yang memuat penjelasan umum terkait dengan organisasi mulai dari tugas pokok dan fungsi hingga sumber daya manusia yang mendukung serta potensi, isu strategis dan permasalahan.
- b. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**, yang memuat tentang perencanaan strategis terkait dengan arah kebijakan dan strategi nasional serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

- c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**, yang memuat tentang tahapan pengukuran kinerja, pengukuran capaian kinerja yang merupakan perbandingan hasil dan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis efisiensi, capaian kinerja lainnya dan realisasi anggaran termasuk analisis dana yang tidak terserap.
- d. BAB IV PENUTUP**, yang memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dan prestasi organisasi serta saran sebagai upaya menetapkan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran sebagai data dukung penyusunan LKIP Tahun 2020, meliputi sebagai berikut :

1. Cascading Map
2. Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan TA. 2020
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
4. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis tersebut dijelaskan dalam *Strategic Map* BPTD Wilayah IX Prov. Jawa Barat. *Strategic Map* tersebut dimaksudkan untuk lebih merinci dan mempertegas turunan Indikator Kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam rangka memenuhi *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, dan Learn and Growth Perspective*. (*Strategic Map* terlampir)

#### **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja (sebelumnya disebut dengan Penetapan Kinerja) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang capaiannya ditunjukkan oleh indikator kinerja dan target. Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci target dan program kegiatan yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun agar dapat dilaksanakan dengan terencana dan terarah. Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 memberi informasi mengenai:

- a. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada periode Tahun 2020;
- b. Program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
- c. Total alokasi anggaran dalam DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, ditampilkan dalam tabel berikut:

a. Subbagian Tata Usaha

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	1. Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	laporan	1
		2. Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	laporan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 44.480.796.000

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		2. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan	17
		3. Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	2
		4. Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Kegiatan	3
		5. Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Bahan	0
		6. Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan	Titik	12

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		/ rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		7. Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Kegiatan	2
		8. Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Bahan	0
		9. Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Bahan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 27.201.000.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.036.848.000

c. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
		2. Penyusunan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
		3. Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
		4. Penyusunan bahan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
		5. Penyusunan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	6. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 3.000.000.000

d. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	Kegiatan	1
		2. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	Kegiatan	0
		3. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	Kegiatan	1
		4. Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		5. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	14
		6. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Kegiatan	1
		7. Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	Kegiatan	0
		8. Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	Kegiatan	0
		9. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 53.466.252.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 4.003.000.000

Untuk mencapai output sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dialokasikan anggaran total untuk Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 162.636.267.000 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu satu s/d lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

### 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang disampaikan adalah informasi yang terbaru mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap IKU organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKU akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Prosentase pengukuran IKU (Unit)

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKU (Unit)} = \frac{\text{Realisasi a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKU (Unit)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times \text{IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

a. Indikator Kinerja Utama BPTD Jabar

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM			CAPAIAN TRIWULAN			
		KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	TW I	TW II	TW III	TW IV
				REVISI PK	TAHUN 2019		(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Lanjutan	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	Lokasi	1	1	100	1	1	1	1
		Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1	1	100	1	1	1	1
		Pengadaan Lahan UPPKB	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Pemasangan ZOSS (Kota/Kab)	Lokasi	13	13	100	13	13	13	13
		Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat	Paket	5	5	100	5	5	5	5
		Marka Jalan	m <sup>2</sup>	0	0	100	0	0	0	0
		Rambu Tiang F	Buah	258	258	100	258	258	258	258
		Patok Lalu Lintas	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Paku Jalan	Unit	0	0	100	0	0	0	0
Pagar Pengaman Jalan	m <sup>2</sup>	1248	1248	100	1248	1248	1248	1248		
Alat Penerangan Jalan	Unit	716	716	100	716	716	716	716		

		Lampu Peringatan Pemakai Jalan	Unit	50	50	100	50	50	50	50
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Paket	0	0	100	0	0	0	0
		Cermin Tikungan	Buah	0	0	100	0	0	0	0
		Alat Penerangan Jalan	Unit	33	33	100	33	33	33	33
		Lampu Peringatan Pemakai Jalan	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Paket	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah paket ATCS (baru)	Paket	0	0	100	0	0	0	0
		Pengembangan Transportasi Perkotaan	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Pengadaan Bus	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek	0	0	100	0	0	0	0
		Dukungan terhadap pengembangan aeropolis Jawa Barat (Kertajati)	Paket	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah unit pembangunan bus air	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah unit pembanguan kapal penyeberangan perintis baru	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah unit pembanguan kapal penyeberangan perintis lanjutan	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah lokasi rehabilitasi pelabuhan penyeberangan	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan sungai baru	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan sungai lanjutan	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah lokasi peningkatan/rehabilitasi pelabuhan sungai	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan danau baru	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan danau lanjutan	Paket	1	1	100	1	1	1	1
		Jumlah lokasi peningkatan/rehabilitasi pelabuhan danau	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Subsidi operasional keperintisan Angkutan SDP (lintas)	Lokasi	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah unit sarana bantu navigasi pelayaran	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah unit pengadaan rambu sungai danau	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah unit halte sungai	Unit	0	0	100	0	0	0	0
		Jumlah paket pengerukan kolam pelabuhan	Paket	0	0	100	0	0	0	0
2	Meningkatnya dukungan sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata isaja, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarispan	Laporan	1	1	100	1	1	1	1
		Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B	Bahan	1	1	100	1	1	1	1

Tabel 3.2.1 Indikator Utama BPTD Prov. Jawa Barat Tahun 2019

### 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin **baik**, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin **buruk**, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap target PK Revisi Tahun 2020

Realisasi pencapaian kinerja BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tinggi dengan kinerja yang **baik**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left( \frac{160.769.447.542}{162.636.267.000} \right) \times 100 \% = 98.89\% \text{ (BAIK)}$$

Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program, yaitu sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM			KEUANGAN		
		KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
				REVISI PK	TAHUN 2019		REVISI PK	TAHUN 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Tipe A Lanjutan	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	Lokasi	1	1		29.689.357.000	28.412.924.249	95,70
		Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1	1		8.894.139.000	8.861.429.243	99,63
		Pengadaan Lahan UPPKB	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah lokasi Pemasangan ZOSS (kota/Kab)	Lokasi	13	13	100	3.003.000.000	2.947.845.100	98,16
		Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Impelementasi Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat	Paket	5	5	100	1.000.000.000	999.310.000	99,93
		Marka Jalan	m <sup>2</sup>	0	0	0	-	-	-
		Rambu Tiang F	Buah	258	258	100	1.780.056.000	1.780.056.000	100
		Patok Lalu Lintas	Buah	0	0	0	-	-	-
		Paku Jalan	Buah	0	0	0	-	-	-
		Pagar Pengaman Jalan	m <sup>2</sup>	1248	1248	100	2.399.760.000	2.399.760.000	100
		Alat Penerangan Jalan	Unit	716	716	100	15.160.802.000	15.160.802.000	100
		Lampu Peringatan Pemakai Jalan	Unit	50	50	100	2.963.590.000	2.963.590.000	100
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Paket	0	0	0	-	-	-
		Cermin Tikungan	Buah	0	0	0	-	-	-
		Alat Penerangan Jalan	Unit	33	33	33	730.000.000	730.000.000	100
		Lampu Peringatan Pemakai Jalan	Unit	0	0	0	-	-	-
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Paket	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Paket ATCS (baru)	Paket	0	0	0	-	-	-
		Pengembangan Transportasi Perkotaan	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Pengadaan Bus	Unit	0	0	0	-	-	-
		Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek	9	9	9	5.888.349.000	5.888.349.000	100

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM			KEUANGAN		
		KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
				REVISI PK	TAHUN 2019	(%)	REVISI PK	TAHUN 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dukungan terhadap pengembangan aeropolis Jawa Barat (Kertajati)	Paket	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Paket	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	Paket	1	1	100	3.000.000.000	2.995.451.000	
		Jumlah Lokasi Peningkatan / Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Lokasi	0	0	100	-	-	-
		Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	Lokasi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Unit Halte Sungai	Unit	0	0	0	-	-	-
		Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	Paket	0	0	0	-	-	-
2	Meningkatnya Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha, Rumah Tangga, Pengadaan dan Perlengkapan ATK Kantor, Pengarsipan	Laporan	1	1	100	982.411.000	978.791.000	99,63
		Tersusunnya Bahan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi darat Tipe B	Bahan	1	1	100	5.102.446.000	5.089.600.753	99,75

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja BPTD IX Prov. Jawa Barat Tahun 2020

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2018 - 2019

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM						KEUANGAN							
		KINERJA UTAMA		TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)	TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)		
				REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Kota yang menerapkan angkutan umum masal perkotaan	Kota	2		2			100								
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kota / Kabupaten	25		25			100		439.367.000		439.366.138				100
		Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru	Lokasi		0		0			0			0				0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Tipe A Lanjutan	Lokasi		0		0			0			0				0
		Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	Lokasi		1		1			100		29.689.357.000		28.412.924.249			95,70
		Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit		0		0			0		0		0			0
		Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	Lokasi		0		0			0		0		0			0
		Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (Lanjutan)	Lokasi		0		0			0		0		0			0
		Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	Lokasi		1		1			100		8.894.139.000		8.861.429.243			99,63
		Pengadaan Lahan UPPKB	Lokasi		0		0			0		0		0			0
		Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	Lokasi		13		13			100		3.003.000.000		2.947.845.100			98,16
		Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	Lokasi		0		0			0		0		0			0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Impelementasi Batas Kecepatan	Lokasi		0		0			0		0		0			0
		Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat	Paket		5		5			100		1.000.000.000		999.310.000			99,93

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM						KEUANGAN k k c					
		KINERJA UTAMA		TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)	TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)
				REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Marka Jalan	m2		0		0		0		0		0		0
		Rambu Tiang F	Buah		258		258		100		1.780.056.000		1.780.056.000		100
		Patok Lalu Lintas	Buah		0		0		0		0		0		0
		Paku Jalan	Buah		0		0		0		0		0		0
		Pagar Pengaman Jalan	m2		1248		148		100		2.399.760.000		2.399.760.000		100
		Alat Penerangan Jalan	Unit		716		716		100		15.160.802.000		15.160.802.000		100
		Lampu Peringatan Pemakai Jalan	Unit		50		50		100		2.963.590.000		2.963.590.000		100
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Paket		0		0		0		0		0		0
		Cermin Tikungan	Buah		0		0		0		0		0		0
		Alat Penerangan Jalan	Unit		33		33		100		730.000.000		730.000.000		100
		Lampu Peringatan Pemakai Jalan	Unit		0		0		0		0		0		0
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Paket		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Paket ATCS (baru)	Paket		0		0		0		0		0		0
		Pengembangan Transportasi Perkotaan	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Pengadaan Bus	Unit		0		0		0		0		0		0
		Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek		9		9		100		5.888.349.000		5.888.349.000		100
		Dukungan Terhadap Pengembangan Aeropolis Jawa Barat (Kertajati)	Paket		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	Paket		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	Unit		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	Unit		0		0		0		0		0		0

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM						KEUANGAN					
		KINERJA UTAMA		TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)	TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)
				REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Peningkatan / Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	Paket		1		1		100		3.000.000.000		2.995.451.000		99,85
		Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	Lokasi		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Unit		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	Unit		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Unit Halte Sungai	Unit		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	Paket		0		0		0		0		0		0
2	Meningkatnya Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha, Rumah Tangga, Pengadaan dan Perlengkapan ATK Kantor, Pengarsipan	Laporan		1		1		100		982.411.000		978.791.000		99,63
		Tersusnya Bahan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B	Bahan		1		1		100		5.102.446.000		5.089.600.753		99,75

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM						KEUANGAN						
		KINERJA UTAMA		TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)	TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI	PERSENTASE (%)	PERSENTASE (%)	
				REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	REVISI PK 2019	REVISI PK 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3	Terwujudnya keselamatan berlalu lintas di jalan dan penyebrangan	Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan di jalan nasional	Laporan	0		0		0		0		0		0.00		
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Tersedianya pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Laporan	150		150		100						0.00		
		Jumlah rambu lalu lintas	unit		261		261		100		373.366.000		373.365.689		100,00	
		Jumlah APILL	unit		31		31		100		600.000.000		580.412.690		96,74	
		Jumlah penerangan jalan umum	unit		315		315		100		13.103.642.000		13.103.641.598		100,00	
		Jumlah alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan (GUADRIL)	meter		728		728		100		694.222.000		694.221.024		100,00	
		Jumlah Rambu F	unit		14		14		100							
		Jumlah Portal	unit		2		2		100							
		Jumlah Delineator	unit		51		51		100							
5	Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN BPTD	Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikat	Laporan	200		200		100		413.802.000		413.801.700		100		
6	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah rehabilitasi terminal	Lokasi	4		4		100		10.738.197.000		10.738.195.000		100		
7	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government BPTD	Nilai AKIP	Nilai	83.80		83.80		100				-		-		
		Tingkat penyerapan anggaran	%	100		148.68		148.68		60.357.759.000		60.218.576.340		99,77		
		Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	Bulan	12		12		100		17.771.818.000		17.627.373.367		99,19		
		Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12		12		100		35.913.956.000		34.926.240.334		97,25		

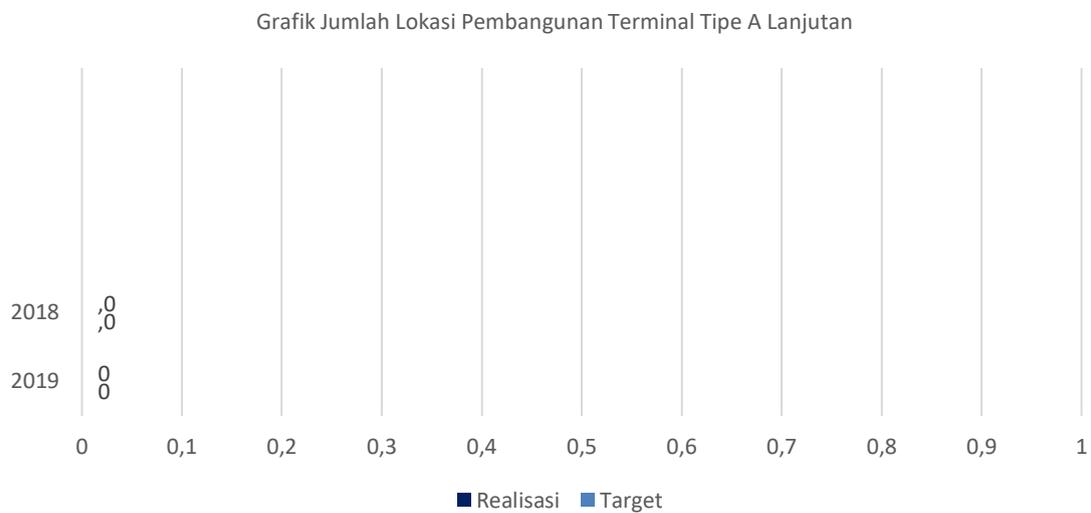
### IK 1. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pembangunan terminal Penumpang Tipe A Baru



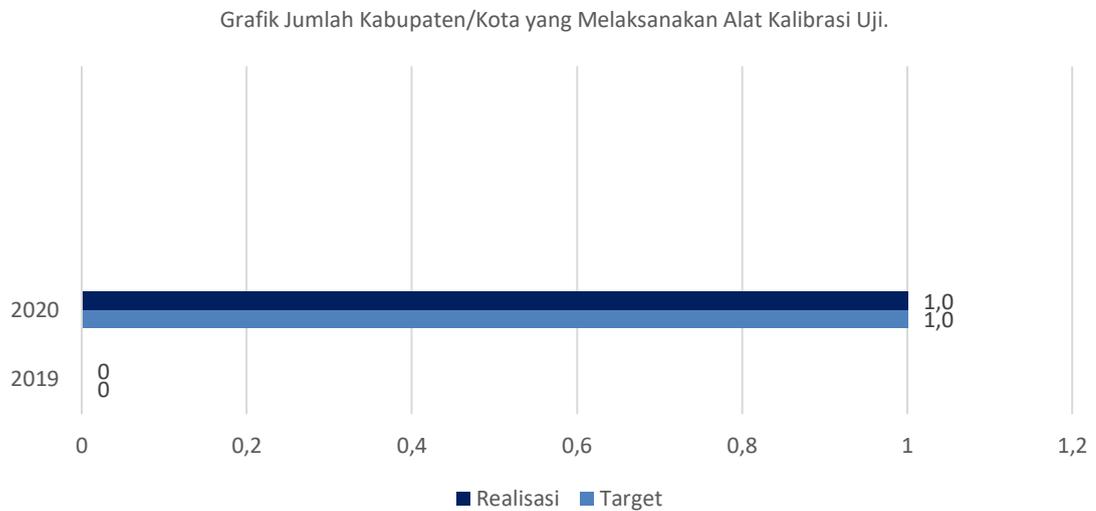
### IK 2. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Lanjutan

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pembangunan terminal Penumpang Tipe A Baru



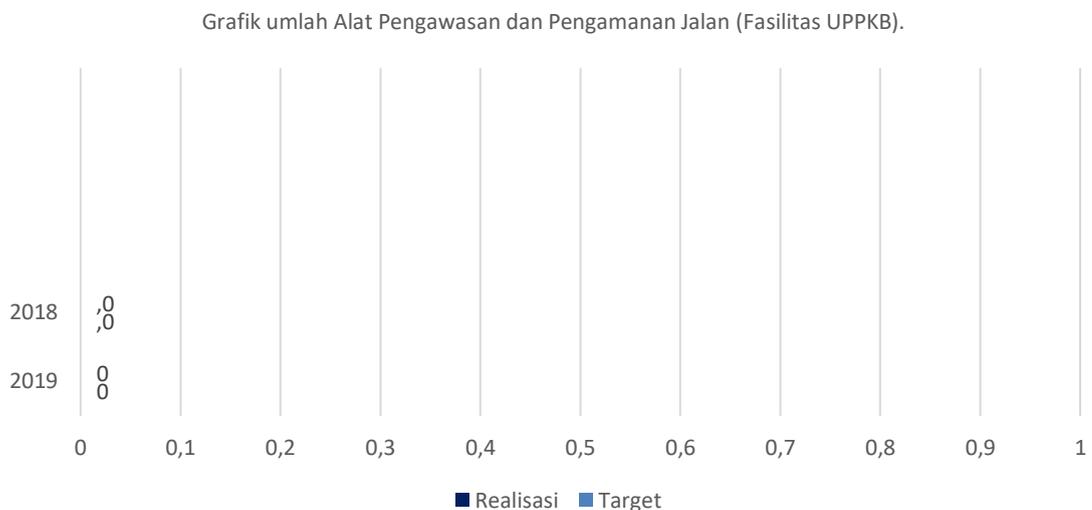
### IK 3. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tersedia data sebesar 1 lokasi dan realisasinya sebesar 1 lokasi atau mencapai 100%.



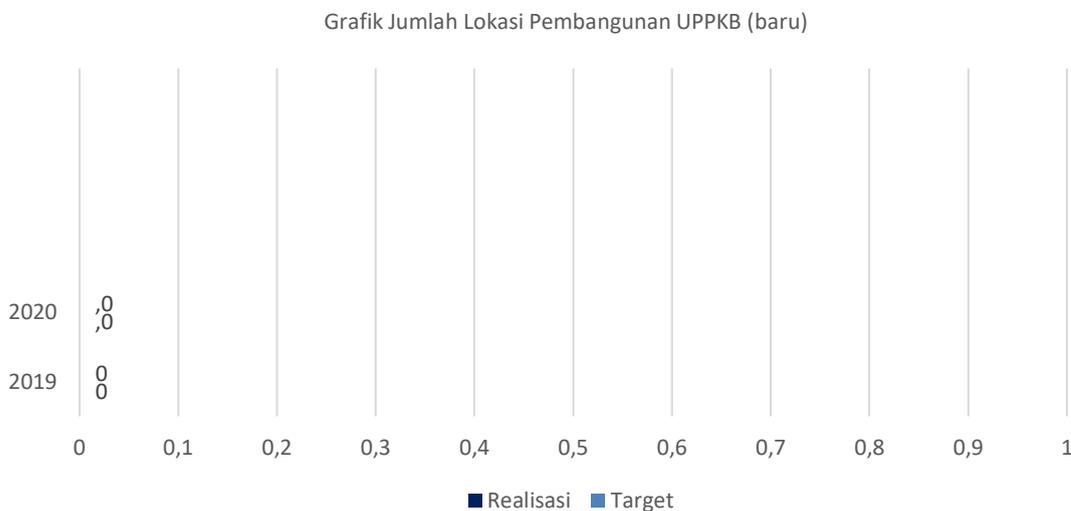
### IK 4. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat pengawasan dan pengamanan fasilitas UPPKB



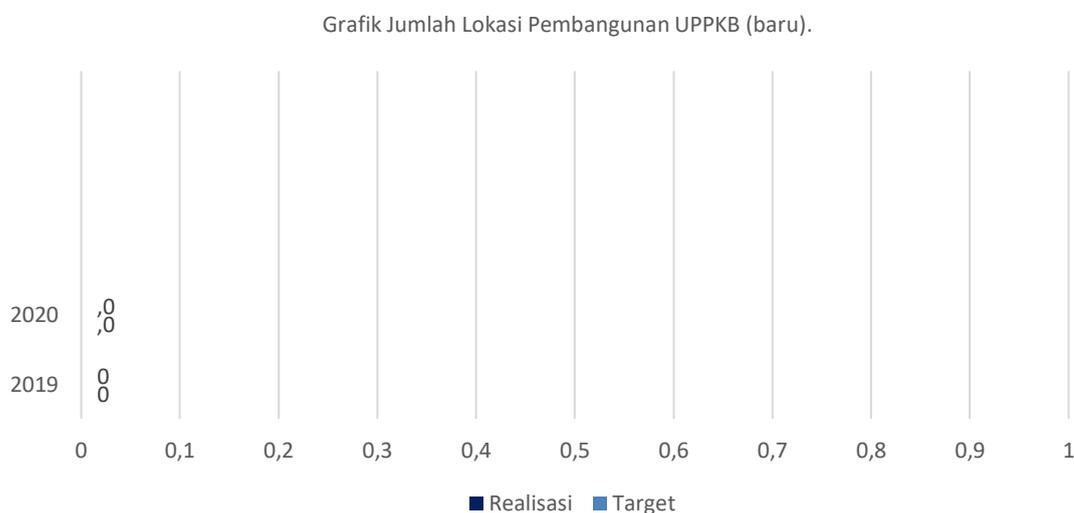
### IK 5. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pembangunan lokasi UPPKB baru



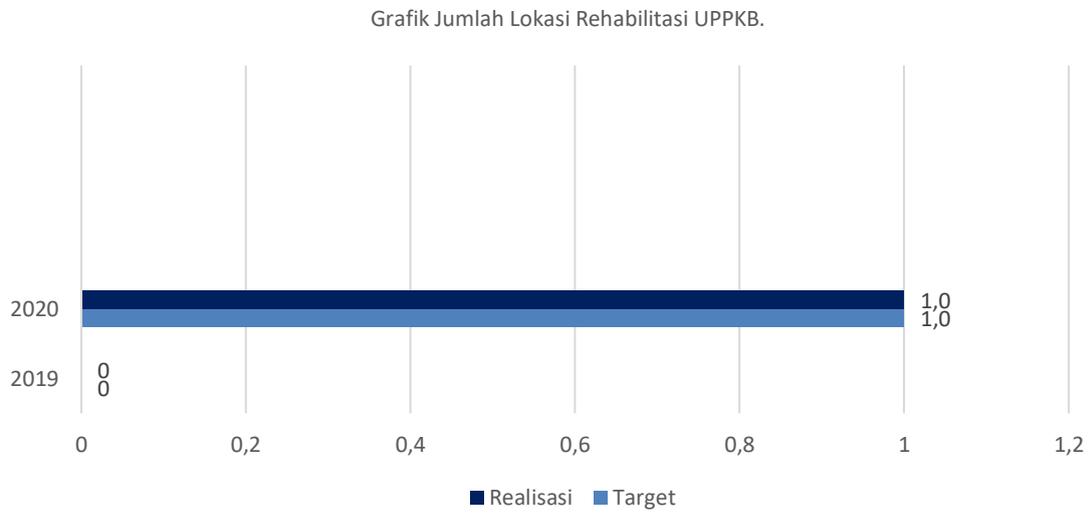
### IK 6. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (Lanjutan)

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan pembangunan UPPKB (lanjutan)



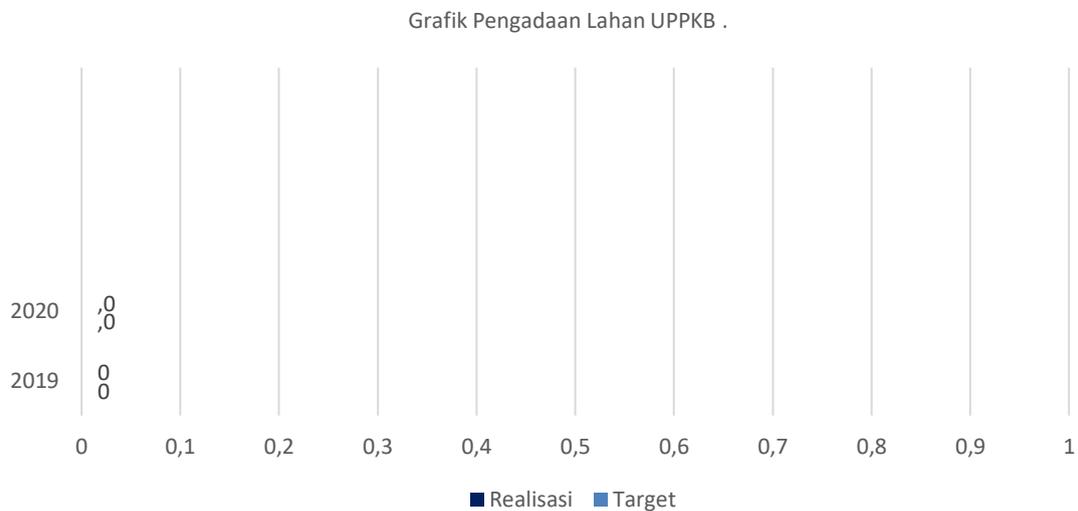
### IK 7. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tersedia data sebanyak 1 lokasi rehabilitasi UPPKB dan realisasinya sebanyak 1 lokasi atau mencapai 100%.



### IK 8. Pengadaan Lahan UPPKB

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tersedia data namun tidak ada pengadaan lahan UPPKB



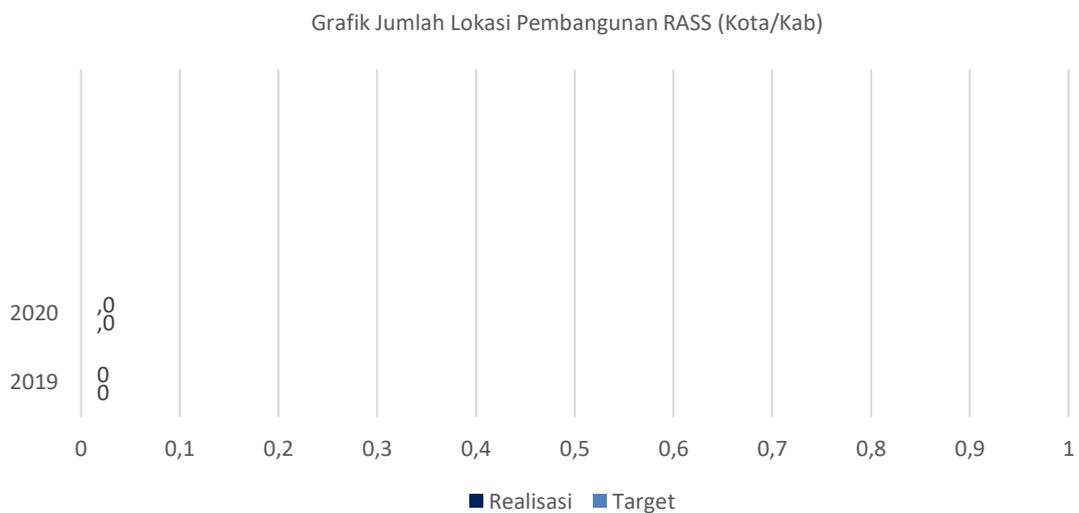
### IK 9. Jumlah Lokasi Pemasangan ZOSS (Kota/Kab)

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tersedia data sebanyak 13 lokasi dan realisasinya sebesar 13 lokasi atau mencapai 100%.



### IK 10. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada lokasi pembangunan RASS (Kota/Kab)



### IK 11. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pembangunan implementasi batas kecepatan



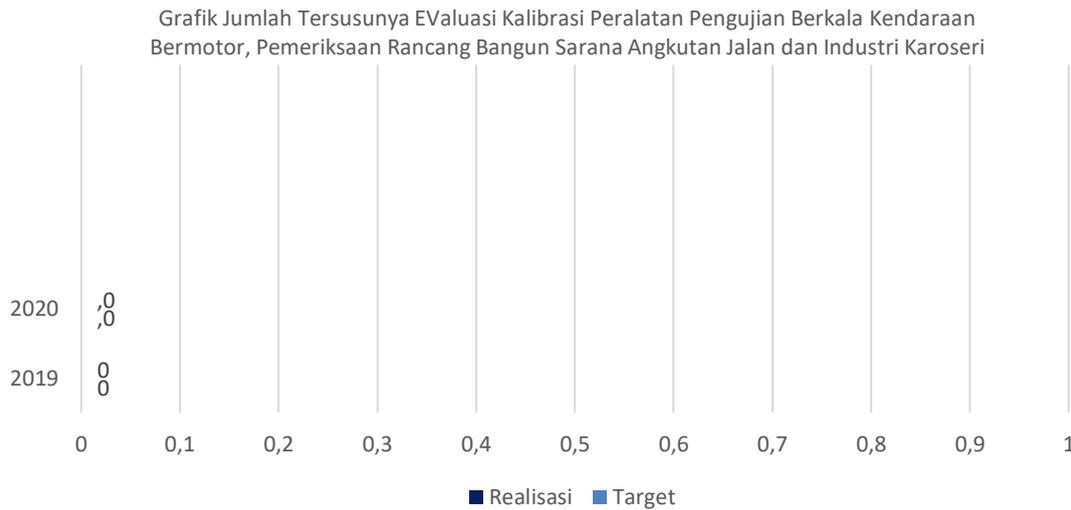
### IK 12. Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5 paket dan realisasinya sebesar 5 paket atau mencapai 100%.



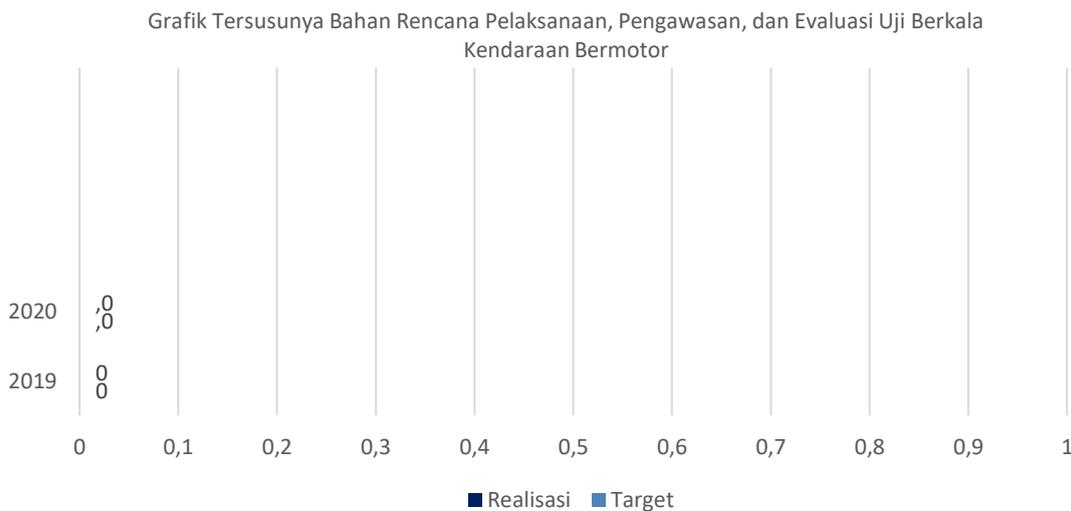
### IK 13. Tersusunnya Evaluasi Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan Industri Karoseri

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya jumlah laporan tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri



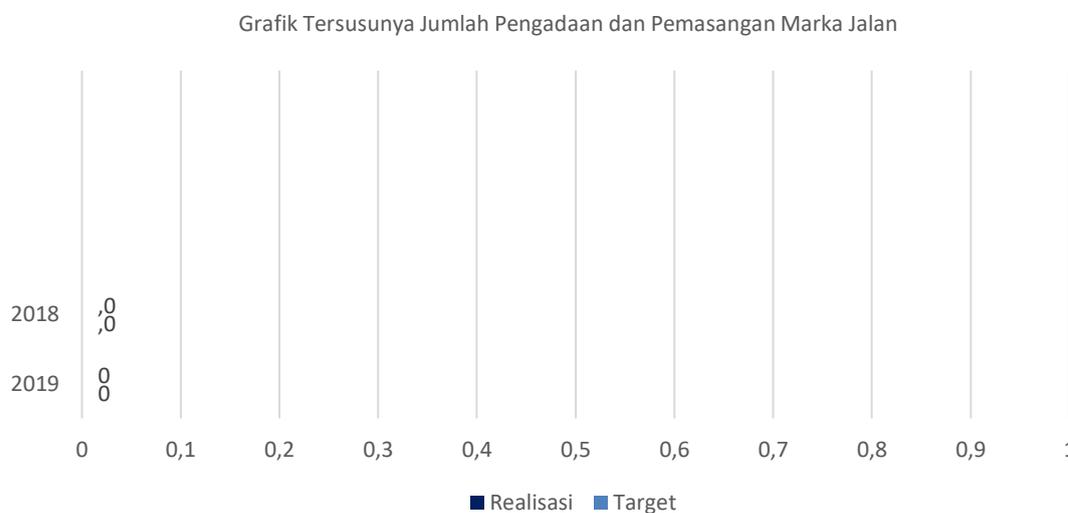
### IK 14. Tersusunnya Bahan Rencana Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Uji Berkala kendaraan Bermotor

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada bahan penyusunan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor



### IK 15. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pengadaan dan pemasangan marka jalan



### IK 16. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang F

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 258 buah dan realisasinya sebesar 258 buah atau mencapai 100%.



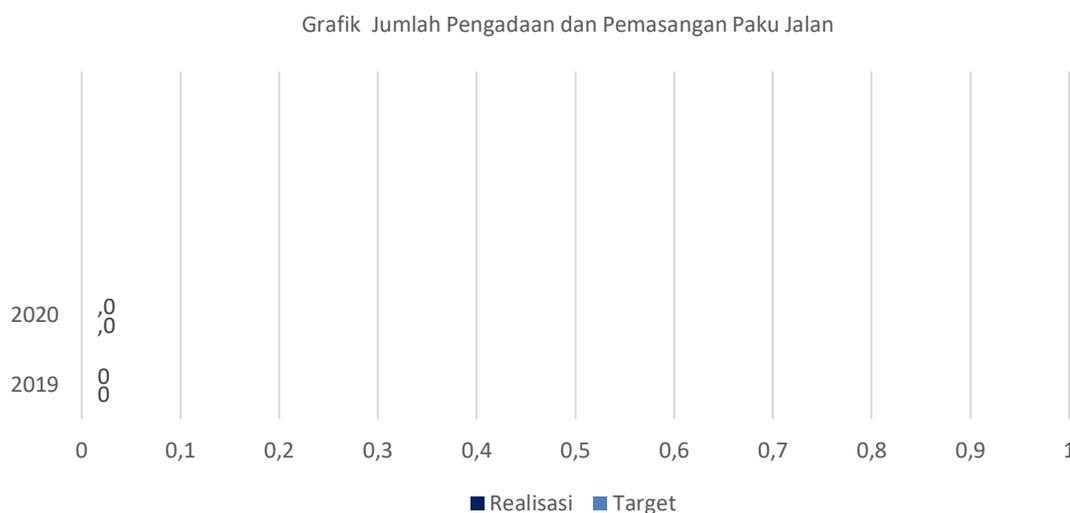
### IK 17. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Patok Lalu Lintas

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pengadaan dan pemasangan patok lalu lintas



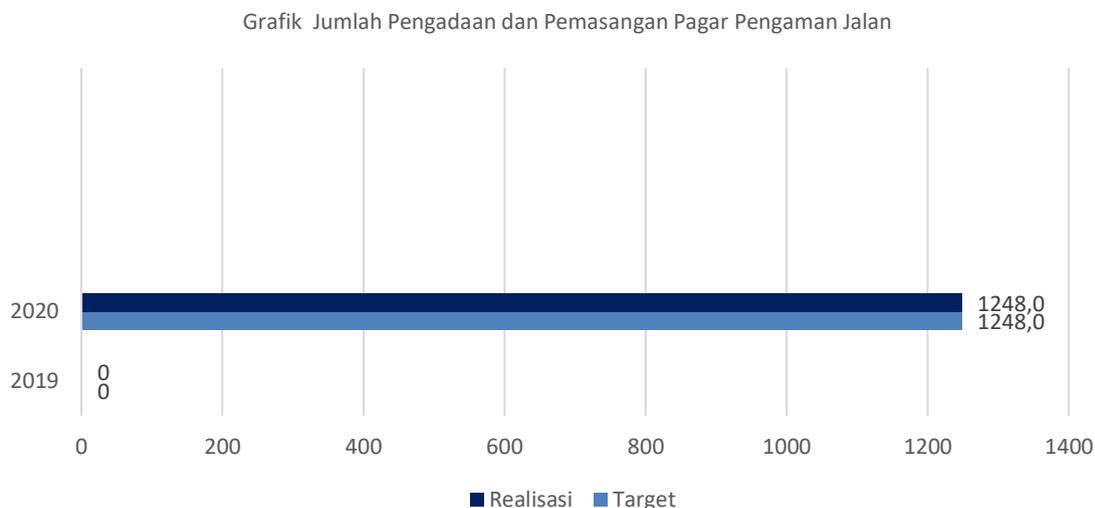
### IK 18. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pengadaan dan pemasangan paku jalan.



### IK 19. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

Pada tahun 2019 tidak tersedia data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1248 m<sup>2</sup> dan realisasinya sebesar 1248 m<sup>2</sup> atau mencapai 100%



### IK 20. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan

Pada tahun 2019 tidak ada data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 716 unit dan realisasinya sebanyak 716 unit atau mencapai 100%.



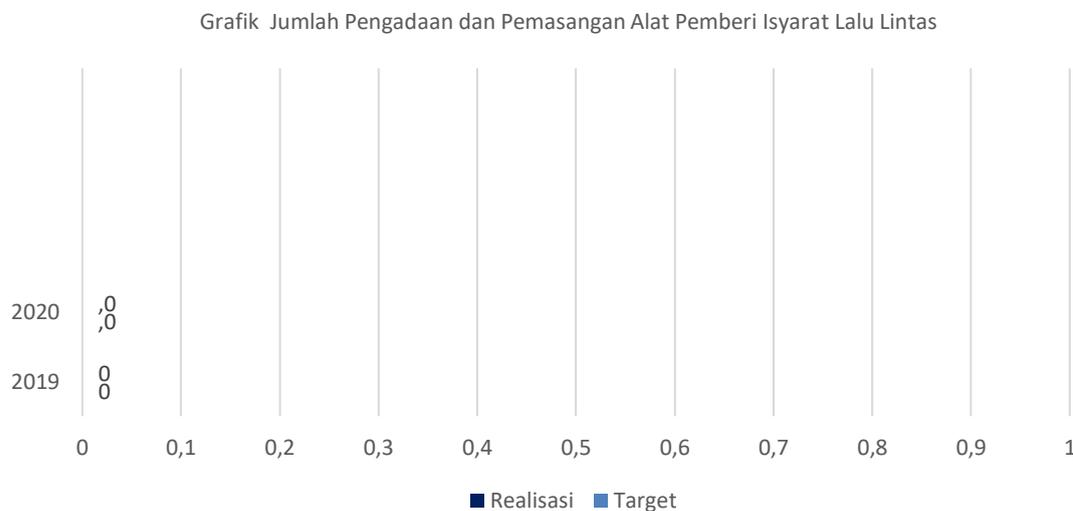
### IK 21. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Pemakai Jalan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 50 unit dan realisasinya sebanyak 50 unit atau mencapai 100%.



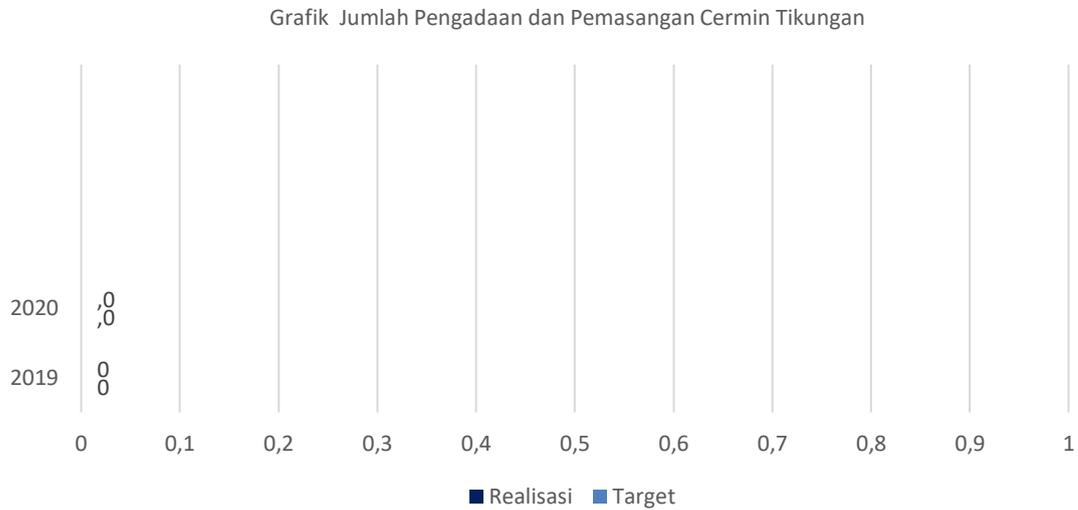
### IK 22. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada paket untuk pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas



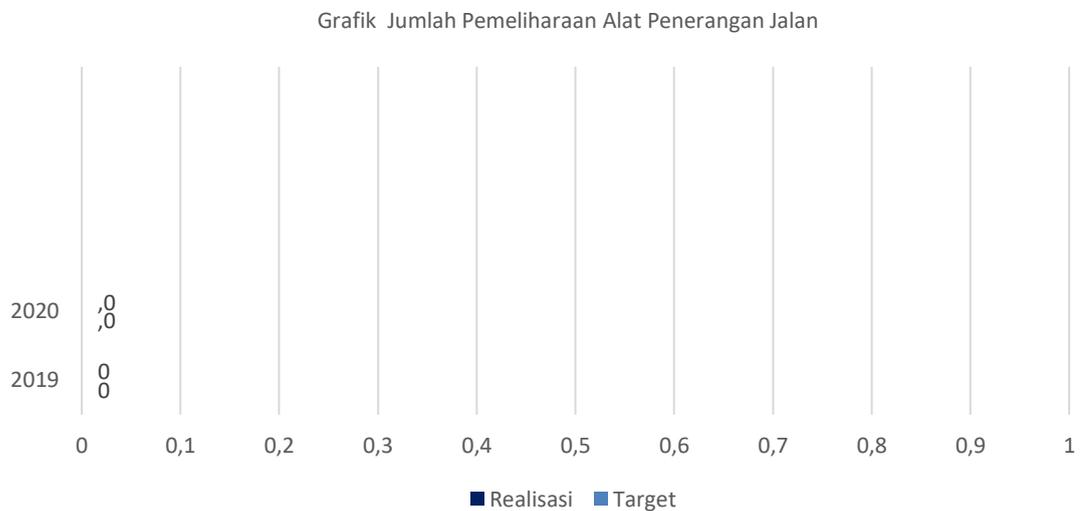
### IK 23. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pengadaan dan pemasangan cermin tikungan



### IK 24. Jumlah Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan

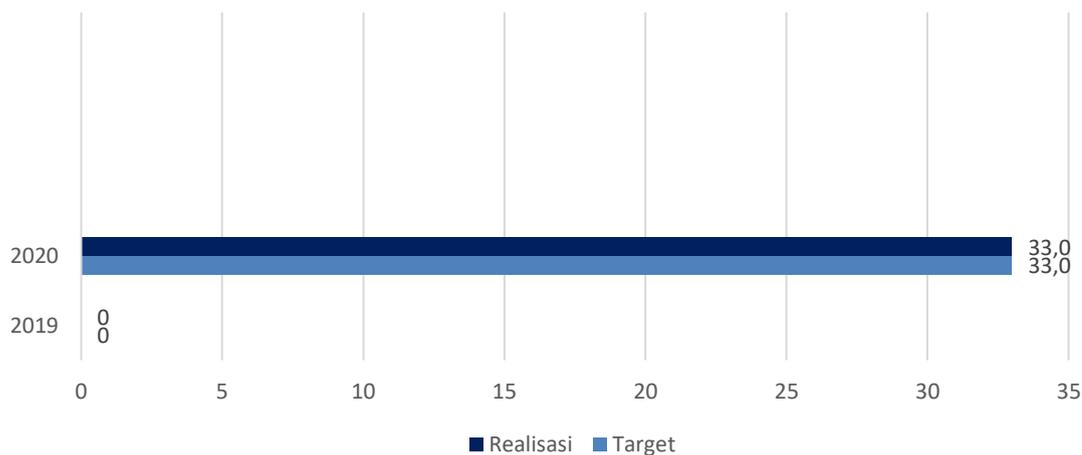
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 33 unit pemeliharaan alat penerangan jalan dan realisasinya sebesar 33 unit atau mencapai 100%.



### IK 25. Jumlah Pemeliharaan Lampu Peringatan Pemakai Jalan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 33 unit pemeliharaan alat penerangan jalan dan realisasinya sebesar 33 unit atau mencapai 100%.

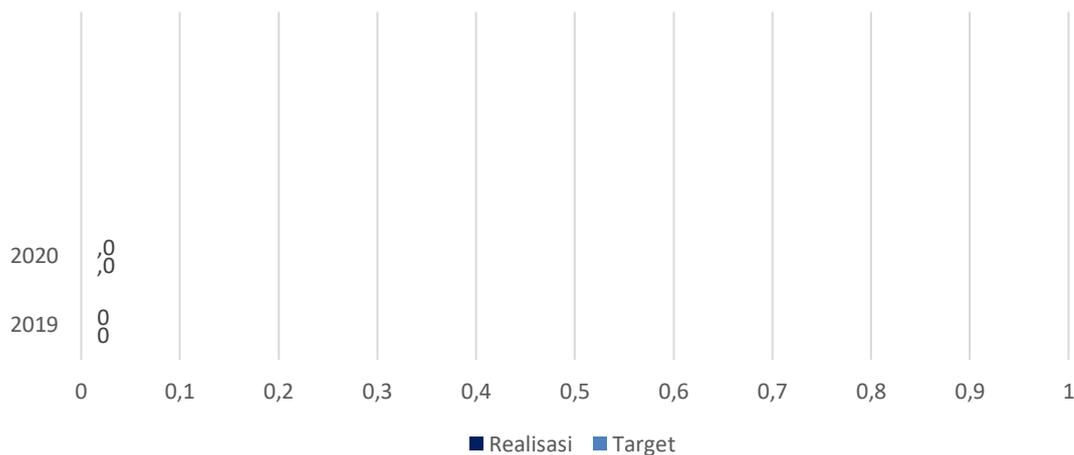
Grafik Jumlah Pemeliharaan Lampu Peringatan Pemakai Jalan



### IK 26. Jumlah Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

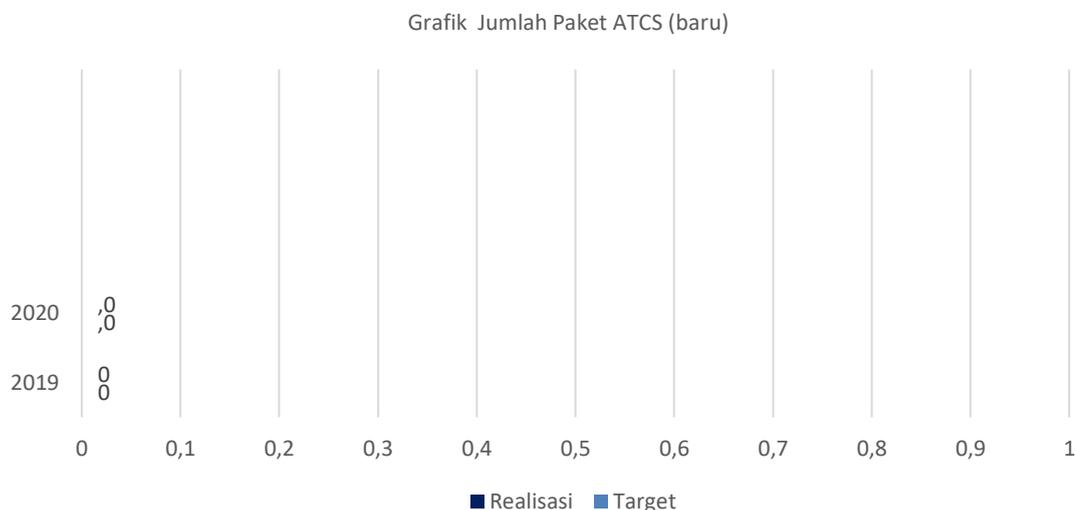
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pemeliharaan alat pemberi isyarat

Grafik Jumlah Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas



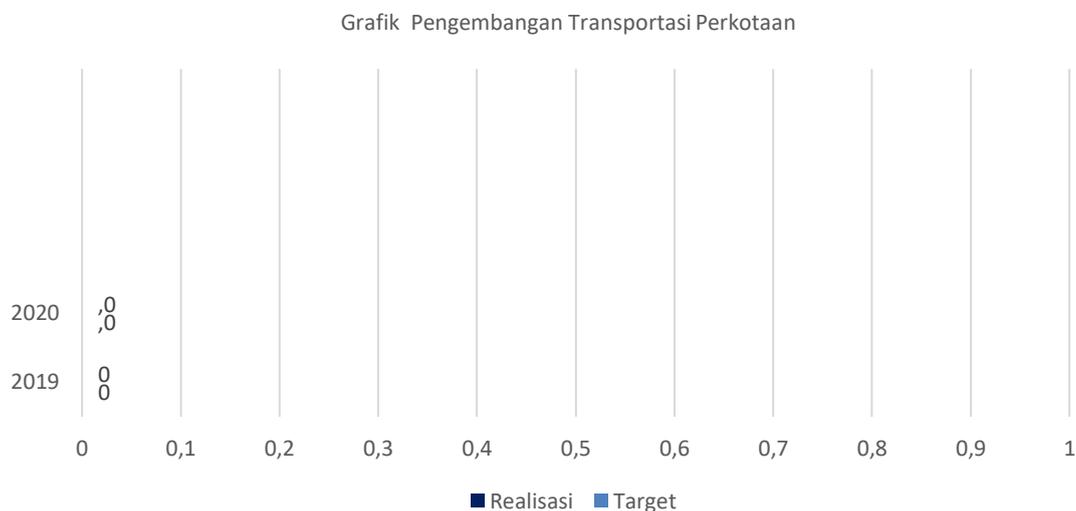
### IK 27. Jumlah Paket ATCS (baru)

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya paket pemasangan ATCS (baru)



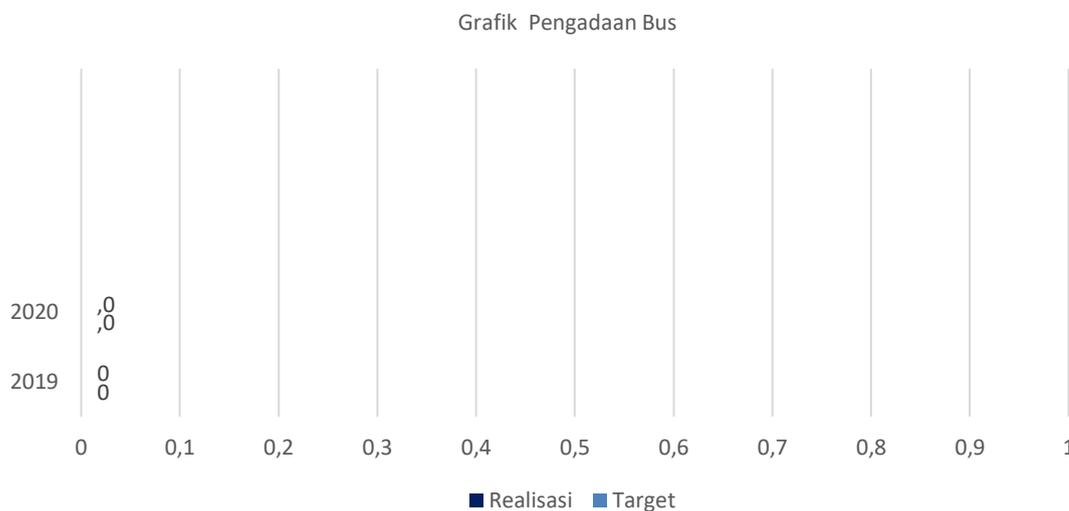
### IK 28. Pengembangan Transportasi Perkotaan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pengembangan transportasi perkotaan



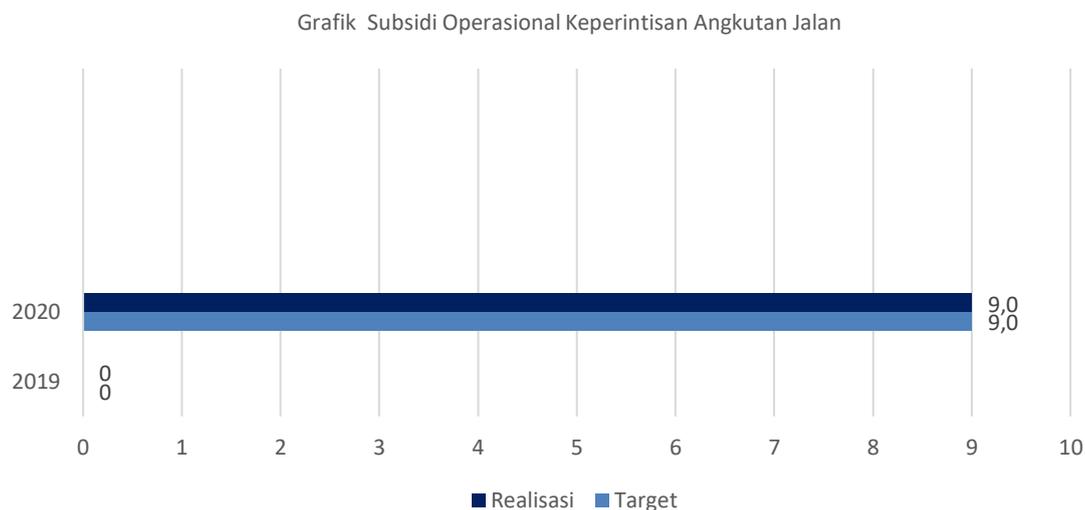
### IK 29. Pengadaan Bus

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pengadaan Bus



### IK 30. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan

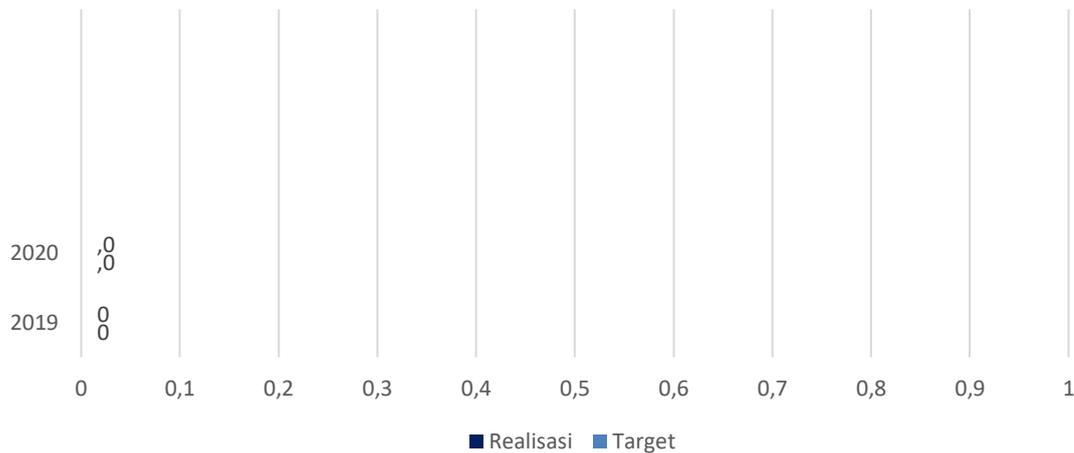
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 9 unit subsidi operasional angkutan jalan dan realisasinya 9 unit atau mnecapai 100%



### IK 31. Dukungan Terhadap Pengembangan Aeropolis Jawa Barat (Kertajati)

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya dukungan terhadap pengembangan aeropolis Jawa Barat (Kertajati)

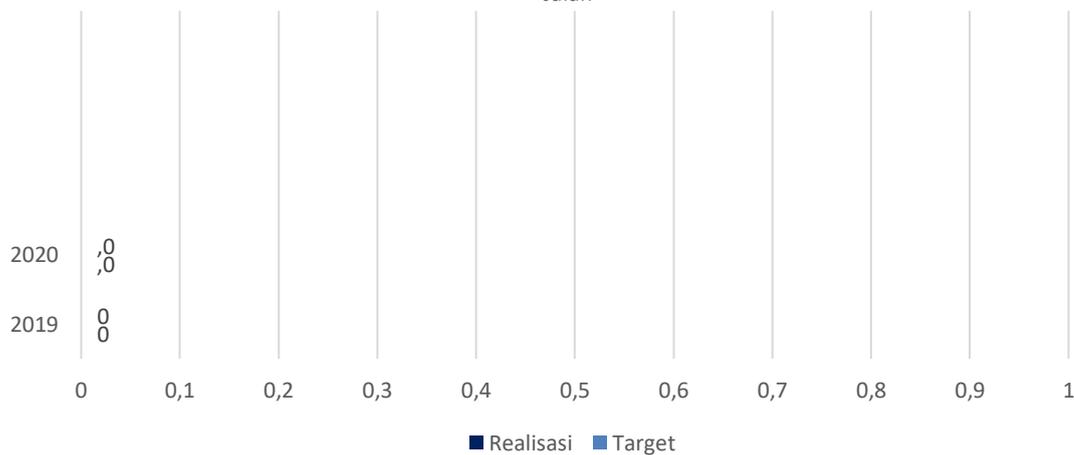
Grafik Dukungan Terhadap Pengembangan Aeropolis Jawa Barat (Kertajati)



### IK 32. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Terhadap Aturan Pembatasan Berat Angkutan Jalan

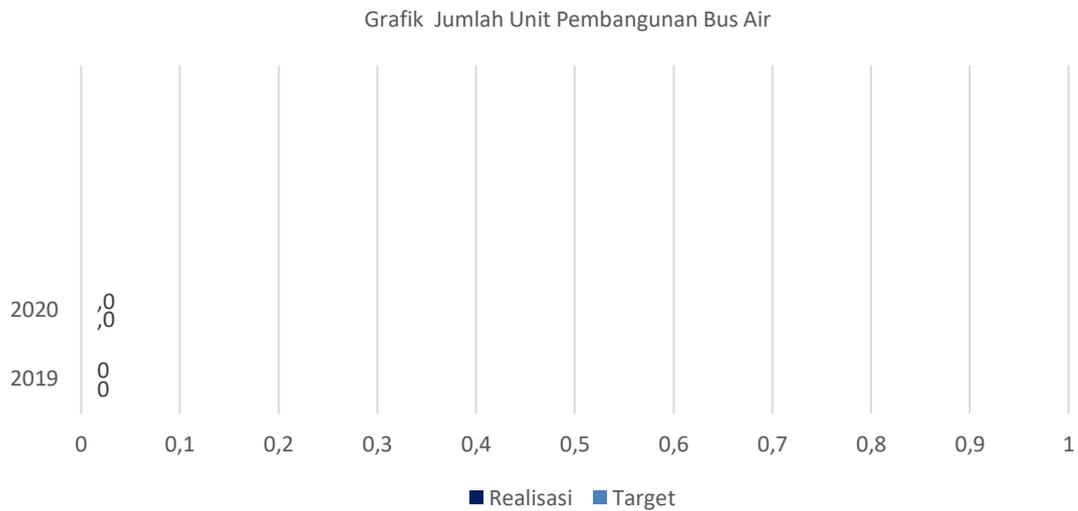
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan

Grafik Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Terhadap Aturan Pembatasan Berat Angkutan Jalan



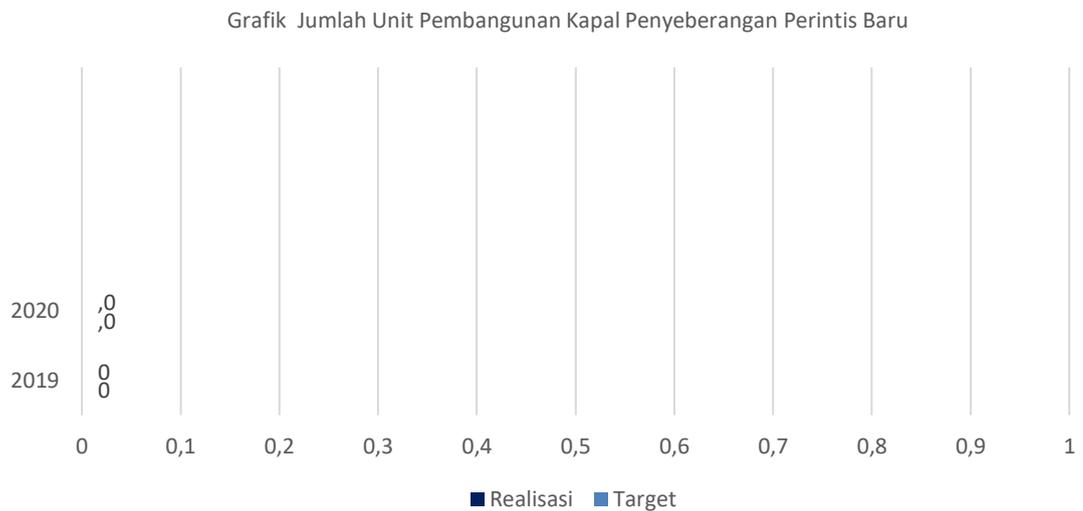
### IK 33. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan pembangunan bus air



### IK 34. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru

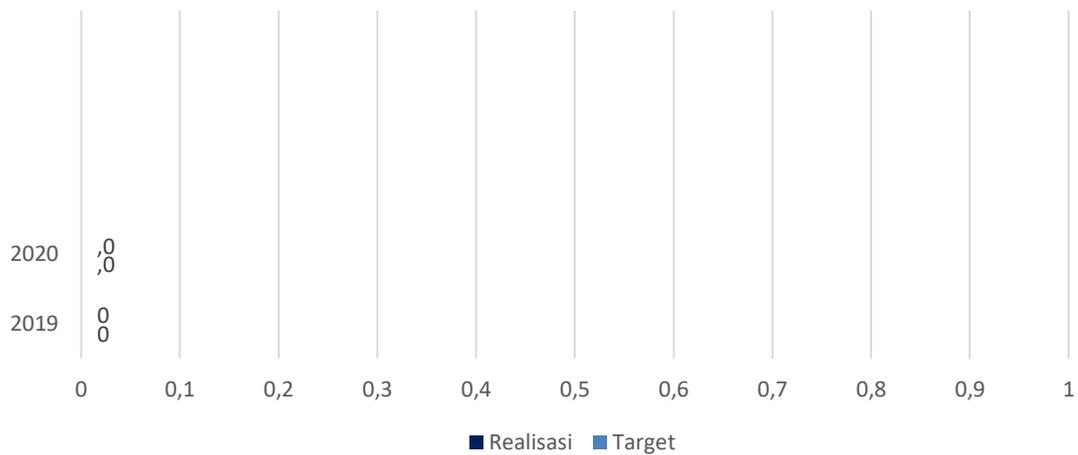
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan pembangunan kapal penyeberangan perintis baru



### IK 35. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan pembangunan kapal penyeberangan perintis lanjutan

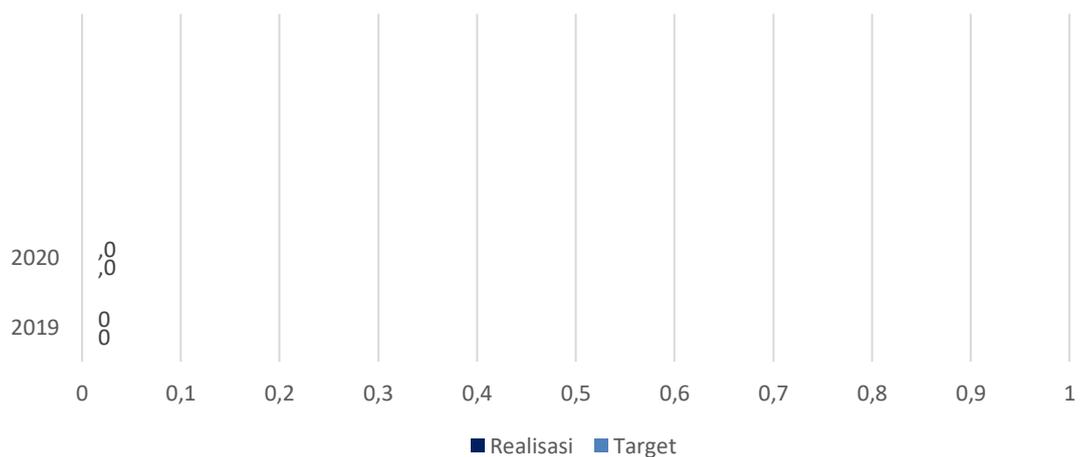
Grafik Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan



### IK 36. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru

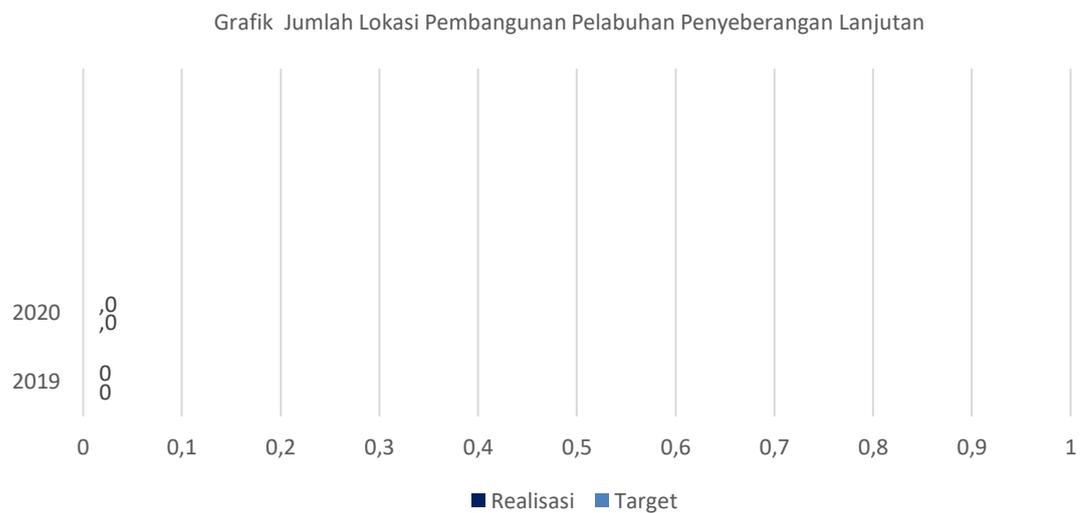
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru

Grafik Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru



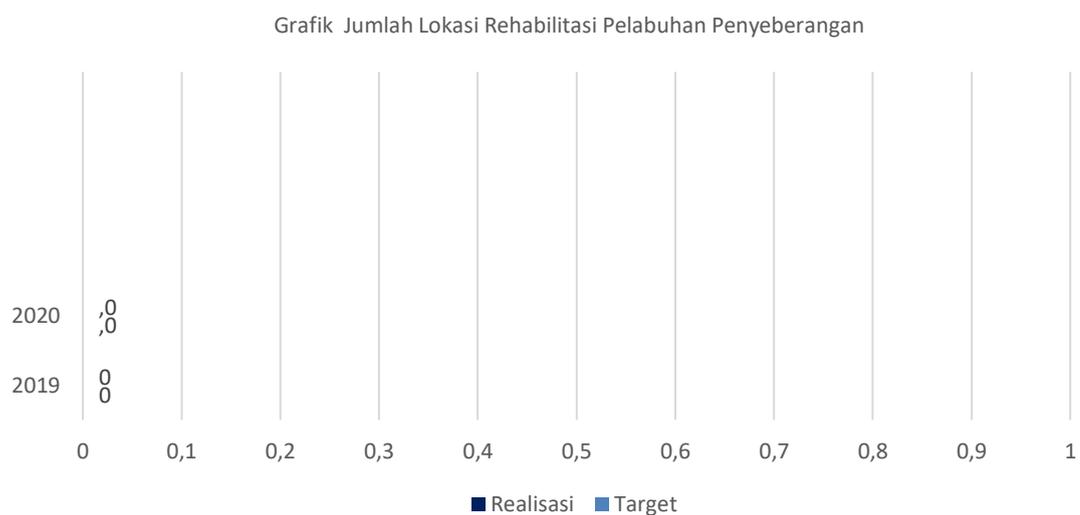
### IK 37. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan



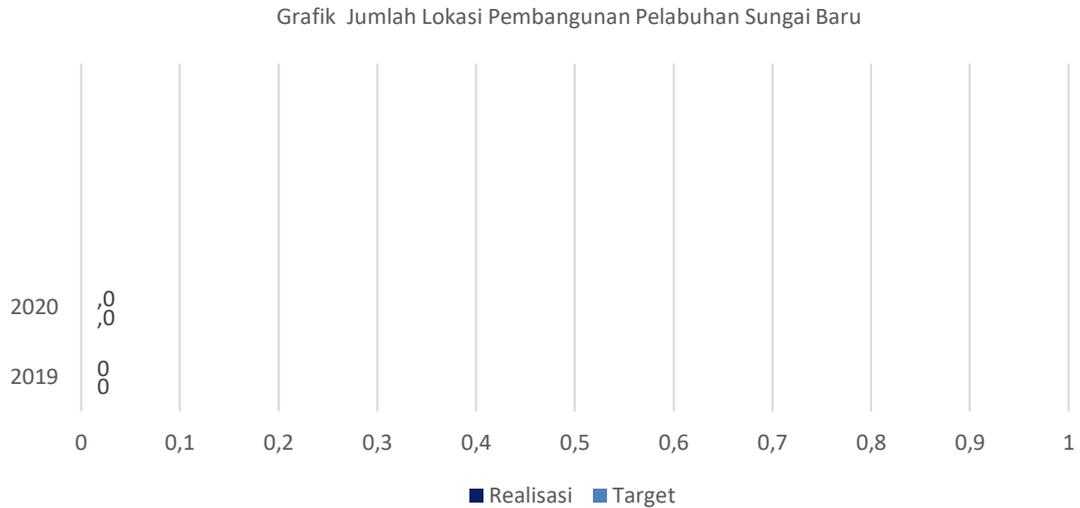
### IK 38. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan



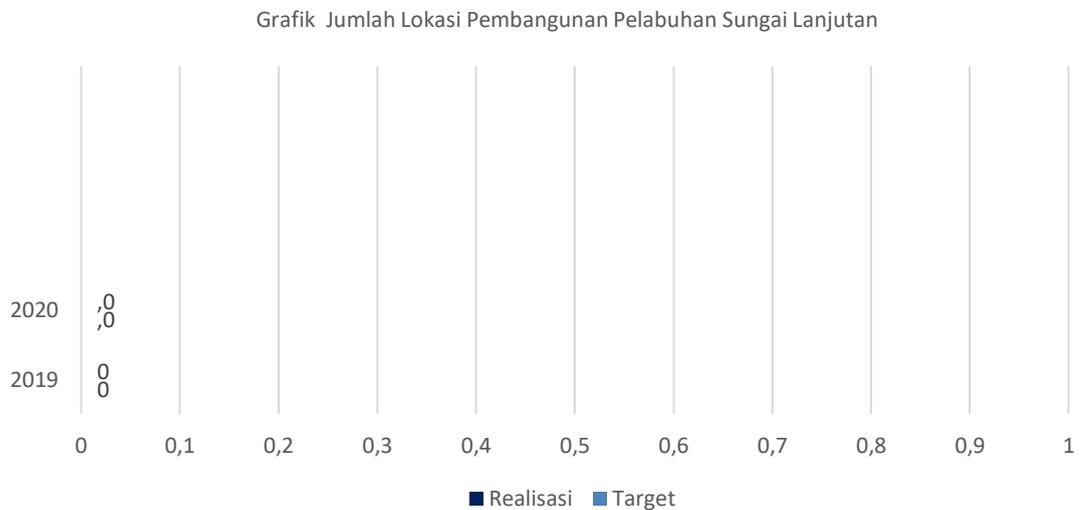
### IK 39. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya lokasi pembangunan pelabuhan sungai baru



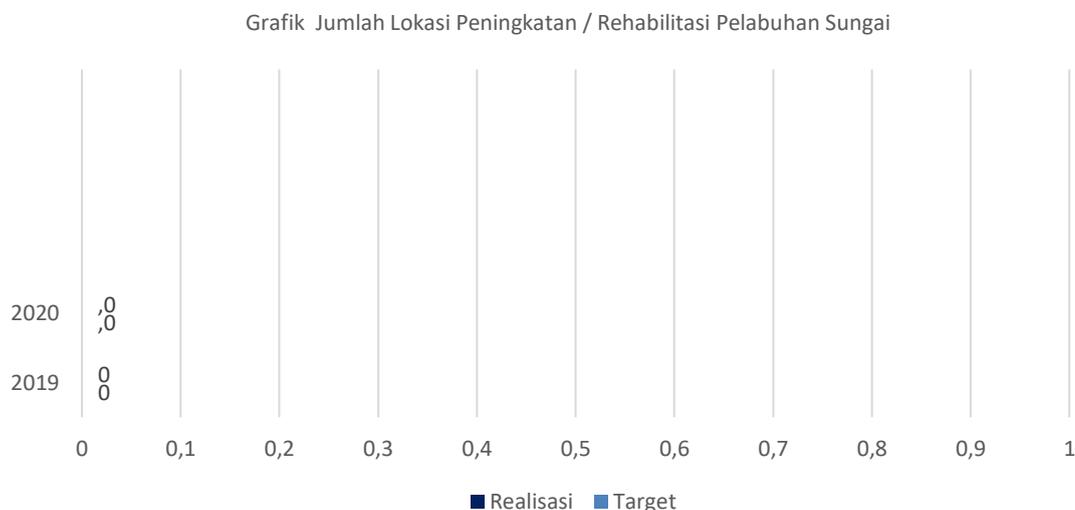
### IK 40. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya lokasi pembangunan pelabuhan sungai lanjutan



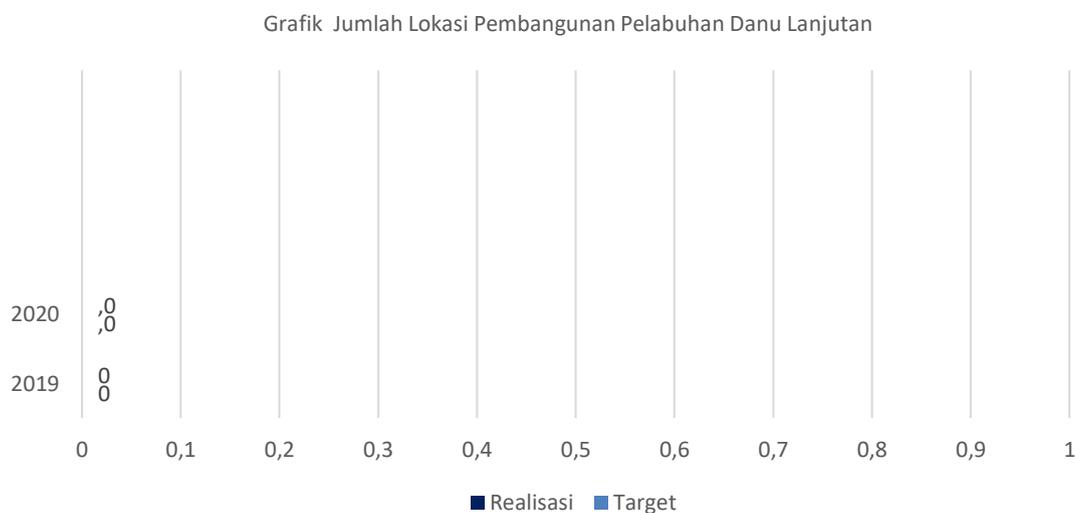
### IK 41. Jumlah Lokasi Peningkatan / Rehabilitasi Pelabuhan Sungai

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya lokasi peningkatan/ rehabilitasi pelabuhan sungai



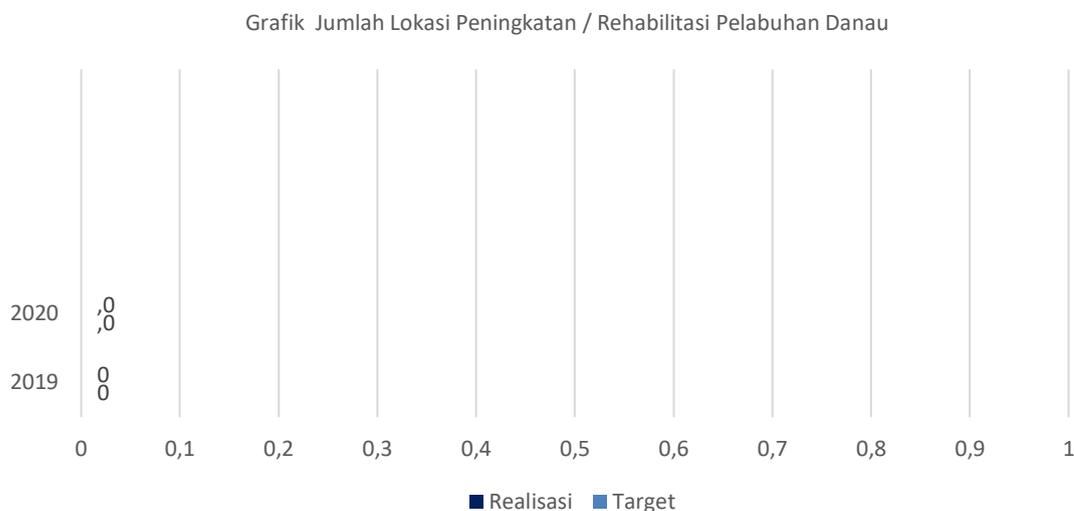
### IK 42. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya lokasi pembangunan pelabuhan danau lanjutan



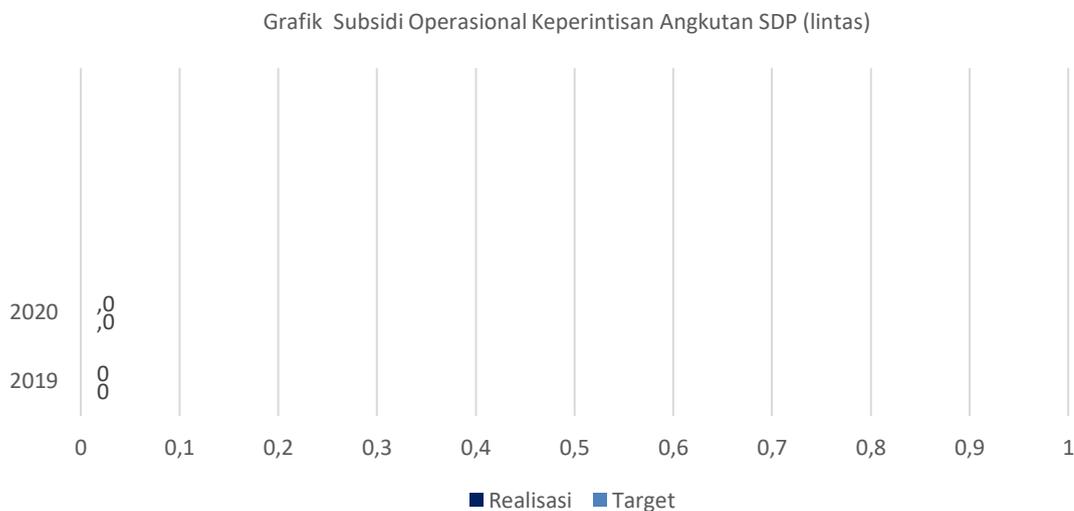
### IK 43. Jumlah Lokasi Peningkatan / Rehabilitasi Pelabuhan Danau

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya lokasi peningkatan / rehabilitasi pelabuhan danau



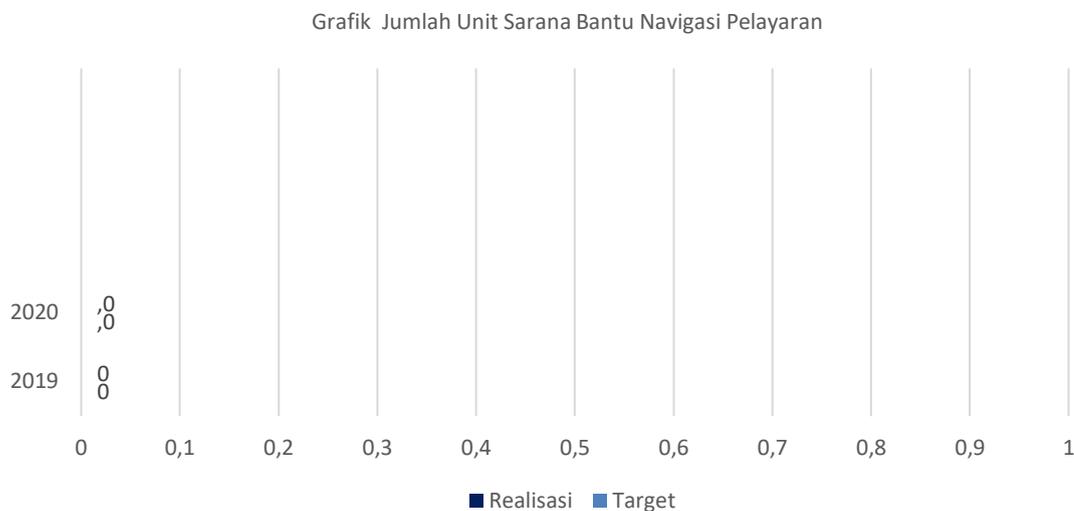
### IK 44. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (lintas)

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya lokasi subsidi operasional keperintisan angkutan SDP (lintas)



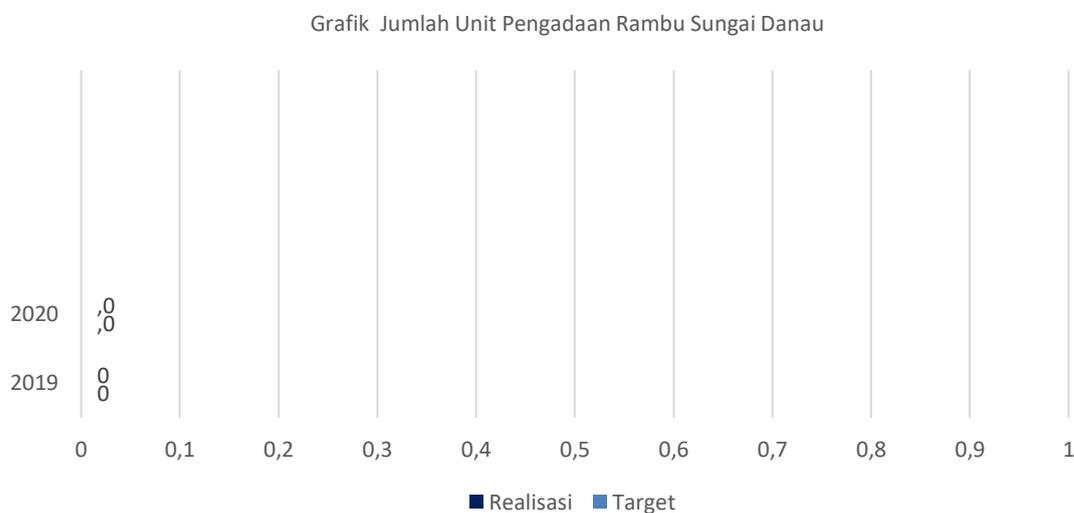
### IK 45. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran



### IK 46. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau

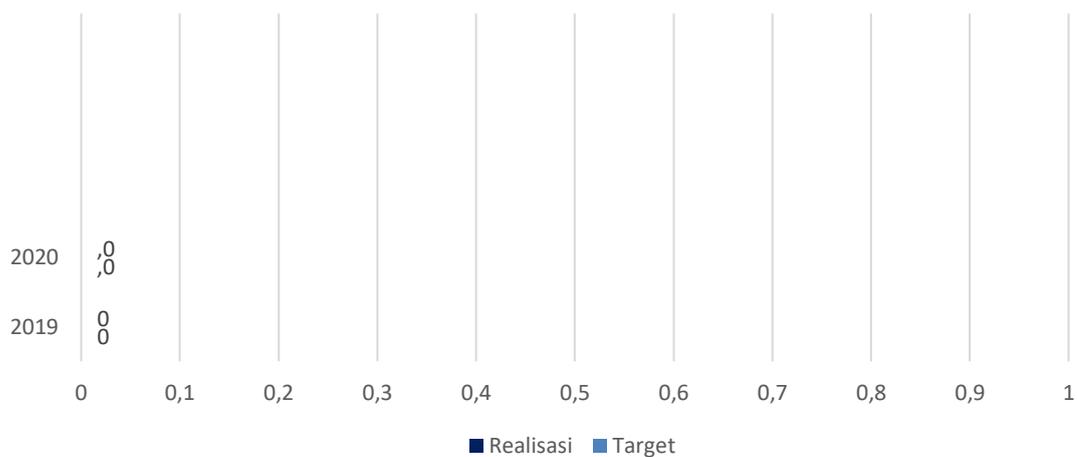
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pemasangan pengadaan rambu sungai danau



### IK 47. Jumlah Unit Halte Sungai

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya pemasangan halte sungai

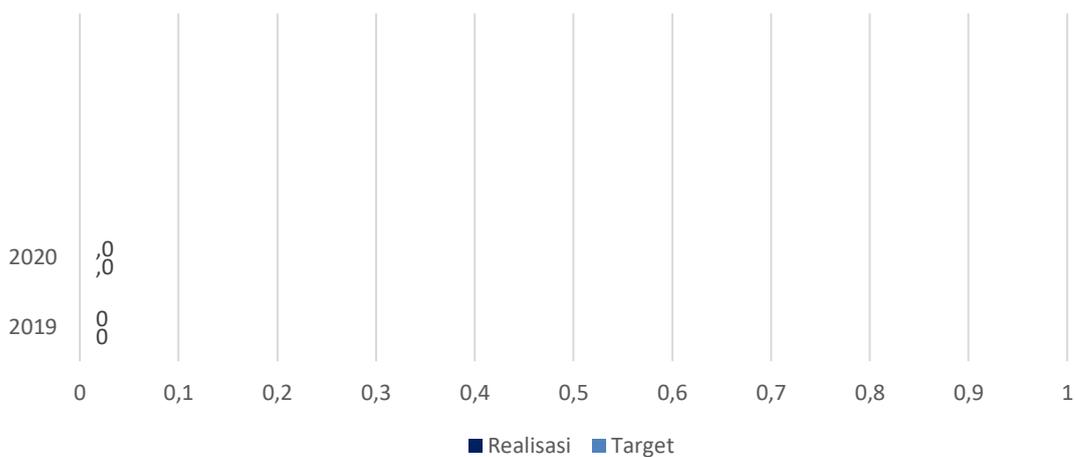
Grafik Jumlah Unit Halte Sungai



### IK 48. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan

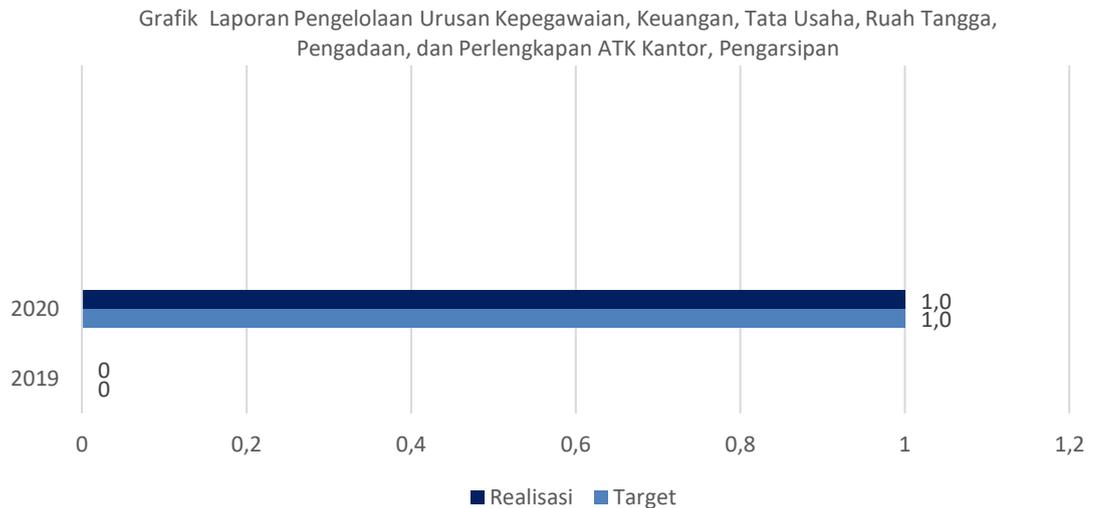
Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 tidak adanya paket pengerukan kolam pelabuhan

Grafik Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan



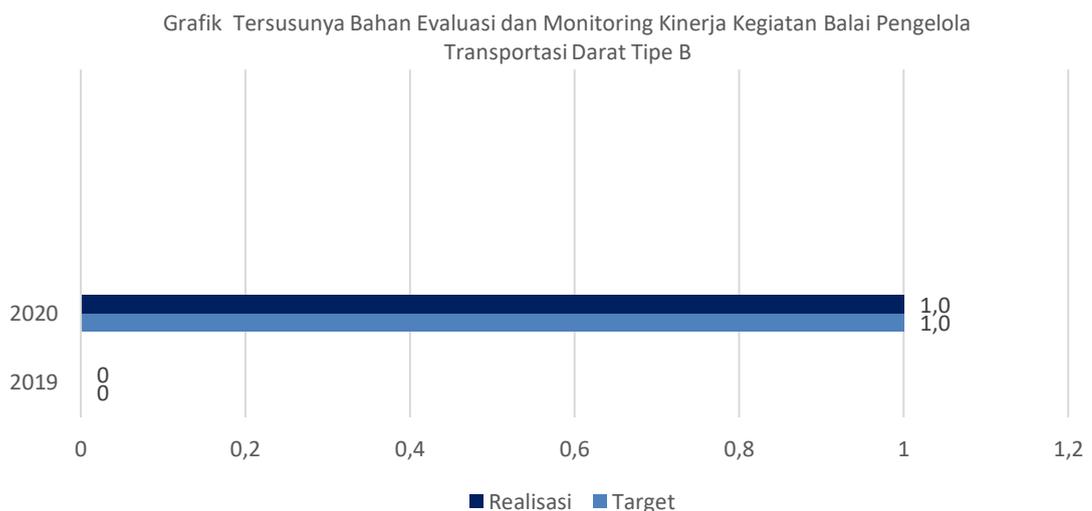
### IK 49. Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha, Rumah Tangga, Pengadaan dan Perlengkapan ATK Kantor, Pengarsipan

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1 laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan dan realisasinya sebesar 1 laporan atau mencapai 100%



### IK 50. Tersusunnya Bahan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B

Pada tahun 2019 tidak tersedianya data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1 bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B



- c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 terhadap Target Kinerja pada Tahun 2020 dalam Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET REVISI PK	REALISASI TAHUN 2018	(%)	TARGET RENSTRA DITJEN HUBDAT 2015-2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Meningkatnya layanan transportasi di wilayah kerja BPTD Wilayah IX Prov. Jawa Barat	Laporan	0	0	0	572	0	0.00
2.	Terwujudnya Keselamatan Berjalan Lintas di Jalan dan Penyeberangan	Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan di jalan nasional	Laporan	18753	18751	99.99	27,237,680	18751	0.07
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Tersedianya pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Laporan	0	0	0.00	5,664	0	0.00
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat dan	Laporan	150	150	100.00	700	150	21.43
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Meningkatnya jumlah pembangunan sungai, danau, dan rehabilitasi terminal	Laporan	8	7	87.50	2,768	7	0.25
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	Meningkatnya jumlah penerapan MRL	Laporan	0	0	0.00	0	0	0.00
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	Meningkatnya tingkat penyerapan anggaran dan penyelenggaraan tingkat administrasi perkantoran belanja pegawai yang baik	Laporan	124	119.08	96.03	203	119.08	58.66

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dalam Renstra Kementerian Perhubungan

### 3.3 Analisis Efisiensi

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasa terminal Penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)				
	a Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru	0	0	0	0,00
	b Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Lanjutan	0	0	0	0,00
	c Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	29.689.357.000	28.412.924.249	1.276.432.751	95,70
	d Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	0	0	0	0,00
	e Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	0	0	0	0,00
	f Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (Lanjutan)	0	0	0	0,00
	g Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	8.894.139.000	8.861.429.243	32.709.757	99,63
h Pengadaan Lahan UPPKB	0	0	0	0,00	
2	Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	0	0	0	0,00
3	Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020				
	a Jumlah LOKasi Pemasangan ZOSS (Kota/Kab)	3.003.000.000	2.947.845.100		98,16

NO	INDIKATOR KINERJA		PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
				Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
	b	Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	0	0	0	0,00
	c	Jumlah Lokasi Pembangunan Impelementasi Batas Kecepatan	0	0	0	0.00
	d	Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat	1.000.000.000	999.310.000	690.000	99,93
4	Tersusunnya Evaluasi Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan Industri Karoseri		0	0	0	0.00
5	Tersusunnya Bahan Rencana Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor		583,440,000	583,366,668	73,332	100
6	Tersusunnya Pengelolaan, Pengawasan, Penyelenggaraan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		262,886,000	262,885,915	85	100.00
	a	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan				
		• Marka Jalan				
		• Rambu Tiang F	1.780.056.000	1.780.056.000	0	
		• Patok Lalu Lintas	0	0	0	0,00
		• Paku Jalan	0	0	0	0,00
		• Pagar Pengaman Jalan	2.399.760.000	2.399.760.000	0	100
		• ALat Penerangan Jalan	15.160.802.000	15.160.082.000	0	100
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	2.963.590.000	2.963.590.000	0	100
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	0	0	0	0,00
	• Cermin Tikungan	0	0	0	0,00	
b	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
	• Alat Penerangan Jalan	730.000.000	730.000.000	0	100	
	• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0,00	
c	Jumlah Paket ATCS (baru)	0	0	0	0,00	
d	Pengembangan Transportasi Perkotaan	0	0	0	0,00	
e	Pengadaan Bus	0	0	0	0,00	
f	Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	5.888.349.000	5.888.349.000	0	100	
g	Dukungan Terhadap Pengembangan Aeropilis Jabar	0	0	0	0,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
7	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Terhadap aturan Pembatasan Berat Angkutan Jalan	0	0	0	0,00
8	Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan penghawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial				
a	Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	0	0	0	0,00
b	Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	0	0	0	0,00
c	Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	0	0	0	0,00
d	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	0	0	0	0,00
e	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	0	0	0	0,00
f	Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	0	0	0	0,00
g	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	0	0	0	0,00
h	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	0	0	0	0,00
i	Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	0	0	0	0,00
j	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	0	0	0	0,00
j	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	3.000.000.000	2.995.451.000	4.549.000	99,85
k	Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	0	0	0	0,00
l	Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	0	0	0	0,00
m	Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	0	0	0,00
n	Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	0	0	0	0,00
o	Jumlah Unit Halte Sungai	0	0	0	0,00
p	Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	0	0	0	0,00
q	Jumlah Paket Pengerukan	0	0	0	0,00
9	Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan				

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
10	Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan BPTD	5.102.446.000	5.089.600.530	13.185.247	

### 3.4 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target.

#### 3.4.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2020

##### 3.4.1.1 Rincian Sumber Dana

<b>RM</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 146.183.267.000</b>
<b>PNBP</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 6.403.000.000</b>
<b>SBSN PBS</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 10.050.000.000</b>

##### 3.4.1.2 Rincian Jenis Belanja

NO	KETERANGAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	35,947,749	47,091,647	55,148,500	138,187,896
2.	Revisi ke-01	35,947,749	47,541,647	55,148,500	138,637,896
3.	Revisi ke-02	35,947,749	47,541,647	50,083,276	133,572,672
4.	Revisi ke-03	35,947,749	49,041,647	50,083,276	135,072,672
5.	Revisi ke-04	35,947,749	56,277,727	58,208,547	150,434,023
6.	Revisi ke-05	32,075,320	57,624,315	63,978,547	153,678,182
7.	Revisi ke-06	31,774,909	57,624,315	63,187,043	152,586,267
8.	Revisi ke-07	31,774,909	57,624,315	73,237,043	162,636,267
9.	Revisi ke-08	31,774,909	57,624,315	73,237,043	162,636,267

### 3.4.2. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Dana tidak terserap tahun 2020 di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.866.819.458 (1,14%) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa kontrak : Rp. 1.403.711.587,- (0,86%)
- Sisa kegiatan : Rp. 27.540.085,- (0,01%)
- Sisa belanja pegawai : Rp. 435.567.876,- (0,26%)

Dengan demikian, anggaran yang tidak terserap sebagian besar merupakan belanja kontraktrual sebesar Rp. 1.403.711.587,- (0,86%), apabila dilihat dari kinerja keuangan yang terkait dengan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, maka penyerapan anggaran dapat mencapai sebesar 98.86%.

### 3.4.3. Hambatan dan Kendala

Hambatan/Kendala yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi daya serap anggaran Tahun Anggaran 2020 antara lain:

- Kelebihan perhitungan belanja kontraktrual yang mengakibatkan kurang optimalnya realisasi daya serap belanja pegawai tahun anggaran 2020.

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. Kesimpulan

- a. Dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap pelaksanaan kinerja dan penyusunan LKIP Tahun 2020, maka BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2020 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
  2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan prima.
- b. Realisasi pencapaian kinerja BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tinggi dengan kinerja yang **baik**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left( \frac{160.769.447.542}{162.636.267.000} \right) \times 100 \% = 98,86\% \text{ (BAIK)}$$

Dana tidak terserap tahun 2020 di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.866.819.458,- atau (1,60%), di mana anggaran yang tidak terserap terbesar berasal dari anggaran belanja kontraktrual Rp. 1.403.711.587,- (0,86%) yang mencapai dari seluruh anggaran yang tidak terserap.

#### IV.2 Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara

berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

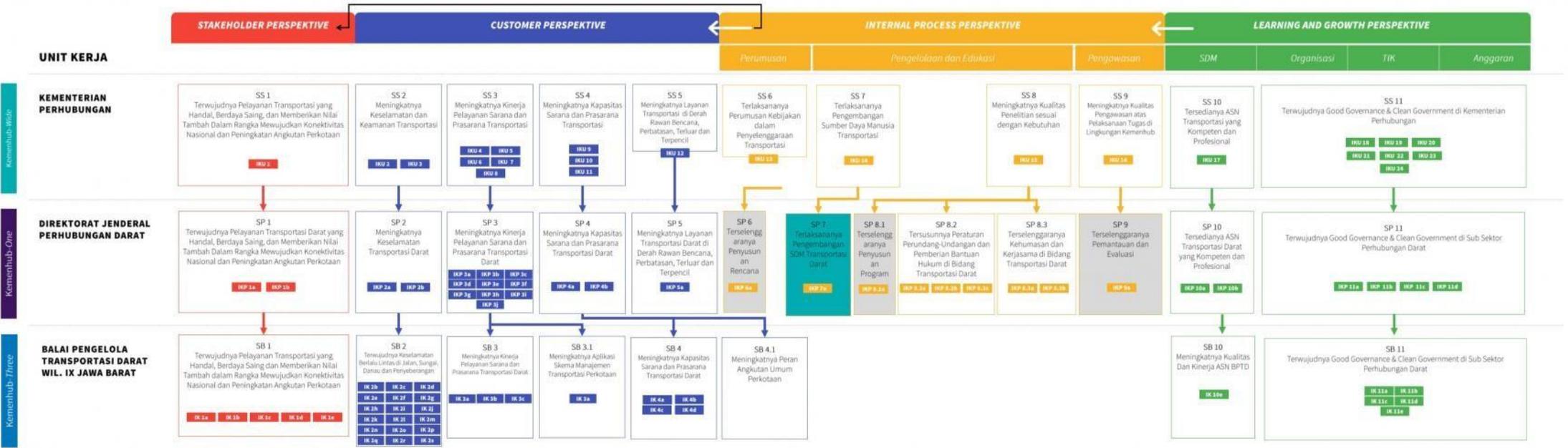
## LAMPIRAN

- Lampiran I.** Cascading Map
- Lampiran II.** Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan TA 2020
- Lampiran III.** Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- Lampiran IV.** Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- Lampiran V.** Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran VI.** Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

# strategic map



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Cascading Kemenhub Belum Masuk

Harus Revisi PK



**LAPORAN REALISASI**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA**  
**BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>TRIWULAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA DANA</b>
Triwulan I (Maret)	162,636,267,000	22,504,636,407	140,131,630,593
Triwulan II (Juni)	162,636,267,000	45,950,733,183	116,685,533,187
Triwulan III (September)	162,636,267,000	94,680,841,197	67,955,425,803
Triwulan IV (Desember)	162,636,267,000	160,769,447,542	1,866,819,458

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020  
 UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX  
 PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	0
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	0
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	Lokasi	1
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	0
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	Lokasi	0
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	Lokasi	0
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	Lokasi	0
		2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	0
		3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pemasangan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	13
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	0
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	0
		d. Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat	paket	5
		4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang	laporan	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri		
		5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	0
		6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	0
		• Rambu Tiang F	buah	258
		• Patok Lalu Lintas	buah	0
		• Paku Jalan	buah	0
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	1.248
		• Alat Penerangan Jalan	unit	716
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	50
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	0
		• Cermin Tlkungan	buah	0
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	33
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	0
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	0
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	0
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	0
		e. Pengadaan Bus	unit	0
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis Jawa Barat (Kertajati)	paket	0
		7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	0
		8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	0
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	0
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	0
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	0
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	0
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	0
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	0
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	0
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	0
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	Paket	1
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Lokasi	0
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	Lokasi	0
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	0
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	0
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	0
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B	bahan	1

Bandung, 2 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**DANDUN PRAKOSA, ST., MSE**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19680105 199703 1 001

**Pihak Pertama**



**TIKA RIZKY NURMARINI, S.Pd.ME**  
Penata (III/c)  
NIP. 19781126 200604 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN DARAT**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	0
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	0
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	1
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	0
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	0
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	0
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	0
		2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	0
		3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	13
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	0
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	0
		4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	0
		5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	0
		6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	0
		• Rambu Lalu Lintas	buah	258
		• Patok Lalu Lintas	buah	0
		• Paku Jalan	buah	0
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	1248

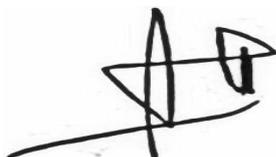
NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Penerangan Jalan</li> </ul>	unit	716
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampu Peringatan Pemakai Jalan</li> </ul>	unit	50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</li> </ul>	paket	0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermin Tikungan</li> </ul>	buah	0
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Penerangan Jalan</li> </ul>	unit	33
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampu Peringatan Pemakai Jalan</li> </ul>	unit	0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</li> </ul>	paket	0
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	0
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	0
		e. Pengadaan Bus	unit	0
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis Jawa Barat (Kertajati)	paket	0
		7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	0
		8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	0
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	0
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	0
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	0
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	0
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	0
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	0
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	0
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	0
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	0
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	paket	1
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	0
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	0
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	0
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	0
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B	Laporan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 27.201.000.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.036.848.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 53.466.252.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 4.003.000.000
6.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 3.000.000.000
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 44.480.796.000

Bandung, 2 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**  
NRP. 6205 0784

**Pihak Pertama**



**DANDUN PRAKOSA, ST., MSE**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19680105 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT**  
**JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Tersusunnya rencana, program dan anggaran	laporan	1
		Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	laporan	1

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 44.480.796.000

Bandung, 2 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**DANDUN PRAKOSA, ST., MSE**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19680105 199703 1 001

**Pihak Pertama**



**TIKA RIZKY NURMARINI, S.Pd.ME**  
Penata (III/c)  
NIP. 19781126 200604 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	Kegiatan	1
		2. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	Kegiatan	0
		3. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	Kegiatan	1
		4. Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		5. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	14
		6. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Kegiatan	1
		7. Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	Kegiatan	0
		8. Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	Kegiatan	0
		9. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 53.466.252.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 4.003.000.000

Bandung, 2 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**DANDUN PRAKOSA, ST., MSE**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680105 199703 1 001

**Pihak Pertama**



**BUDI SANTOSO, SSIT.M.M.Tr**

Pembina (IV/a)

NIP.19740919 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		2. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan	17
		3. Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	2
		4. Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Kegiatan	3
		5. Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Bahan	0
		6. Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020	Titik	12
		7. Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Kegiatan	2
		8. Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Bahan	0
		9. Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Bahan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	2

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 27.201.000.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.036.848.000

Bandung, 2 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**DANDUN PRAKOSA, ST., MSE**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680105 199703 1 001

**Pihak Pertama**



**BUDI SANTOSO, SSIT.M.M.Tr**

Pembina (IV/a)

NIP. 19740919 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT**  
**JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		2. Penyusunan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		3. Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		4. Penyusunan bahan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		5. Penyusunan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	6. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis	laporan	0

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 3.000.000.000

Bandung, 2 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**DANDUN PRAKOSA, ST., MSE**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680105 199703 1 001

**Pihak Pertama**



**MULIA UTAMA PUTRA ALAM**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19631229 199703 1 003

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT**  
**JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	0
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	0
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	Lokasi	1
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	0
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	Lokasi	0
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	Lokasi	0
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	Lokasi	0
		2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	0
		3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pemasangan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	13
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	0
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	0
		d. Jumlah Paket Promosi Keselamatan Transportasi Darat	paket	5
		4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	0
		5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	0
		6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Marka Jalan	m'	0
		• Rambu Tiang F	buah	258
		• Patok Lalu Lintas	buah	0
		• Paku Jalan	buah	0
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	1.248
		• Alat Penerangan Jalan	unit	716
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	50
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	0
		• Cermin Tikungan	buah	0
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	33
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	0
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	0
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	0
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	0
		e. Pengadaan Bus	unit	0
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis Jawa Barat (Kertajati)	paket	0
		7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	0
		8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	0
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	0
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	0
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	0
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	0
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	0
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	0
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	0
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	0
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	0
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	Paket	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Lokasi	0
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	Lokasi	0
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	0
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	0
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	0
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B	bahan	1

Bandung, 30 Desember 2020

**Pihak Kedua**



**DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM**

Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19790205 200604 1 002

**Pihak Pertama**



**EDI KURNIADI, ST**

Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19741130 200312 1 006

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT DIREKTORAT**  
**JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	Sarana dan Prasarana		
		3. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Penyusunan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal	Kegiatan	1
		4. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	Kegiatan	1
		5. Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		6. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala	Lokasi	12
		7. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Kegiatan	1

	8.	Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	Lokasi	1
	Lalu Lintas Jalan			
	9.	Penyusunan bahan Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
	10.	Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan	2
	11.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan)	Kegiatan	12
	12.	Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Kegiatan	2
	13.	Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1
	14.	Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	12
	15.	Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		h. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Rambu Lalu Lintas	buah	428
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	1960
		• Alat Penerangan Jalan	unit	716
		• Warning Light	unit	86
		i. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
	Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan			
	16.	Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan		

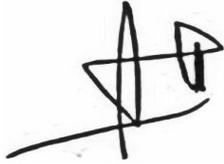
		sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		r. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	1
4.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Sarana dan Prasarana		
		17. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1
		Lalu Lintas Jalan		
		18. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu lintas dan angkutan Jalan	Laporan	2
		Subbag Tata Usaha		
		19. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	Laporan	1
		20. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B	Laporan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp.	27.201.000.000
9.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp.	6.036.848.000
10.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp.	53.466.252.000
11.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp.	4.003.000.000
12.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp.	3.000.000.000

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	
(1)	(2)	(3)	
13.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp.	44.480.796.000

Bandung, 30 Desember 2020

**Pihak Kedua**



**Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**  
NRP. 6205 0784

**Pihak Pertama**



**DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Tersusunnya rencana, program dan anggaran	laporan	1
		Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	laporan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 44.480.796.000

Bandung, 30 Desember 2020

**Pihak Kedua**



**DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM**

Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19790205 200604 1 002

**Pihak Pertama**



**EDI KURNIADI, ST**

Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19741130 200312 1 006

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		2. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan	17
		3. Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	2
		4. Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Kegiatan	3
		5. Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Bahan	0
		6. Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020	Titik	12
		7. Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Kegiatan	2
		8. Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Bahan	0
		9. Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Bahan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	2

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 27.201.000.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.036.848.000

Bandung, 30 Desember 2020

**Pihak Kedua**



**DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM**

Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19790205 200604 1 002

**Pihak Pertama**



**RUDU SUTRISNO, ATD**

Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19711229 199301 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	Kegiatan	1
		2. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	Kegiatan	0
		3. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	Kegiatan	1
		4. Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		5. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	14
		6. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Kegiatan	1
		7. Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	Kegiatan	0
		8. Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	Kegiatan	0
		9. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	0

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 53.466.252.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 4.003.000.000

Bandung, 30 Desember 2020

**Pihak Kedua**



**DANDUN PRAKOSA, ST, M.SE**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680105 199703 1 001

**Pihak Pertama**



**TOFAN MUIS, A.MD.LLAJ, SE.,MM**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19761226 199903 1 004

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		2. Penyusunan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		3. Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		4. Penyusunan bahan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
		5. Penyusunan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial	bahan	0
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	6. Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis	laporan	0

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 3.000.000.000

Bandung, 30 Desember 2020

**Pihak Kedua**



**DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002

**Pihak Pertama**



**DJOKO SRIJANTO, ATD., MSI**

Pembina (IV/a)

NIP. 196804417 199103 1 001